BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

KODE REKENING PENGANGGARAN KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

a. bahwa guna memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan Negara, maka kode rekening penganggaran Kabupaten Pacitan perlu adanya perubahan dan penambahan;
b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan dan penambahan kode rekening diatur oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b serta guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING PENGANGGARAN KABUPATEN PACITAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah .
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupum pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Kode rekening penganggaran yang selanjutnya disebut kode rekening adalah kode rekening yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode rekening yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Kode urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
b. Kode Rekening Program dan Kegiatan;
c. Kode Rekening Pendapatan;
d. Kode Rekening Belanja; dan
e. Kode Rekening Pembiayaan.

Pasal 3

Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening

BAB III
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Organisasi.
(2) Kode dan klarifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 5

(1) Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
(3) Urutan Kode Program dan Kegiatan adalah kode program dan kode kegiatan.
(4) Kode rincian Program dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V
KODE REKENING PENDAPATAN

Pasal 6

Kode pendapatan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan yang merupakan bagian susuman kode akun keuangan daerah.

Pasal 7

(1) Urutan Kode Pendapatan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
(2) Kode rincian obyek pendapatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KODE REKENING BELANJA

Pasal 8

Kode belanja yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun Belanja yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan Daerah.

Pasal 9

(1) Urutan Kode belanja adalah program, kegiatan, jenis, obyek serta rincian obyek.
(2) Kode rincian obyek belanja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KODE REKENING PEMBIAYAAN

Pasal 10

Kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pembiayaan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah.

Pasal 11

(1) Urutan Kode Pembiayaan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
(2) Kode rincian obyek pembiayaan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumdangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal - - 2016

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PACITAN
Nomor : 19 Tahun 2016
Tanggal : 30 - 5 - 2016

KODE REKENING KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
1					URUSAH WAJIB
1	01				Pendidikan
1	01	01			Dinas Pendidikan
1	02				Kesehatan
1	02	01			Dinas Kesehatan
1	02	02			Badan Rumah Sakit Daerah
1	03				Pekerjaan Umum
1	03	01			Dinas Bina Marga dan Pengairan
1	03	02			Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
1	04				Perumahan
1	04	01			Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
1	05				Penataan Ruang
1	05	01			Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
1	06				Perencanaan Pembangunan
1	06	01			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	07				Perhubungan
1	07	01			Dinas Perhubungan, Kommikasi dan Informatika
1	08				Lingkungan Hidnp
1	08	01			Kantor Lingkungan Hidup
1	09				Pertanahan
1	01	01			Dinas Pendidikan
1	02	01			Dinas Kesehatan
1	03	01			Dinas Bina Marga dan Pengairan
1	20	03			Sekretariat Daerah
1	10				Kependudnkan dan Catatan Sipil
1	10	01			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	12	01			Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1	12	01			Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
1	13				Sosial
1	13	01			Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14				Ketenagakerjaan
1	14	01			Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	15				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	15	01			Dinas Koperasi dan UKM
1	16				Penanaman Modal
1	16	01			Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
1	17				Kebudayaan
1	17	01			Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
1	18				Pemudan dan Olah Raga
1	17	01			Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
1	19				Kesatuan Bangsa dan PoUtik Dalam Negeri
1	19	01			Badan Kestuan Bangsa dan Politik
1	19	02			Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	03			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Kenangan
1	20	01			Dewan Perwakilan Rakyat
1	20	02			Bupati/Wakil Bupati
1	20	03			Sekretariat Daerah
1	20	04			Sekretariat DPRD
1	20	05			Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	20	06			Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Sekda
Asisten
Kabag Hukum
1.
2.
3.

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
1	20	07			Inspektorat
1	20	08			Badan Kepegawaian Daerah
1	20	09			Kantor Pendidikan dan Pelatihan
1	20	10			Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
1	20	11			Kantor Kecamatan Pacitan
1	20	12			Kantor Kecamatan Kebonagung
1	20	13			Kantor Kecamatan Tulakan
1	20	14			Kantor Kecamatan Ngadirojo
1	20	15			Kantor Kecamatan Sudimoro
1	20	16			Kantor Kecamatan Arjosari
1	20	17			Kantor Kecamatan Tegalombo
1	20	18			Kantor Kecamatan Nawangan
1	20	19			Kantor Kecamatan Bandar
1	20	20			Kantor Kecamatan Pringkuku
1	20	21			Kantor Kecamatan Punung
1	20	22			Kantor Kecamatan Donorojo
1	20	23			Kelurahan Pacitan
1	20	24			Kelurahan Pucangsewu
1	20	25			Kelurahan Sidoharjo
1	20	26			Kelurahan Baleharjo
1	20	27			Kelurahan Ploso
1	21				Ketahanan Pangan
1	21	01			Kantor Ketahanan Pangan
1	22				Pemberdayaan Masyarakat Desa
1	22	01			Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1	23				Statistik
1	20	01			Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1	24				Kearsipan
1	26	01			Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
2					URUSAN PILIHAN
2	01				Pertanian
1	21	01			Kantor Ketahanan Pangan
2	01	01			Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
2	02	01			Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02				Kehutanan
2	02	01			Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	03				Energi dan Snmber Daya Mineral
2	03	01			Dinas Pertambangan dan Energi
2	04				Pariwisata
1	17	01			Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemudan dan Olah Raga
2	05				Kelautan dan Perikanan
1	05	01			Dinas Kelautan dan Parikanan
2	06				Perdagangan
1	15	01			Dinas Kopcrasi dan UKM
2	07				Perindnatrian
1	15	01			Dinas Koperasi dan UKM
2	08				Ketransmlgrasian
1	13	01			Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Lampiran II : **PERATURAN BUPATI PACITAN**
Nomor : 19 Tahun 2016
Tanggal : 30 - 5 - 2016

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAN KABUPATEN PACITAN

KODE				URAIAN
x	xx	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
x	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x	xx	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x	xx	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x	xx	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
x	xx	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x	xx	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x	xx	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x	xx	01	19	Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
x	xx	01	20	Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran bagi UPT
x	xx	01	21	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
x	xx	01	22	Fasilitasi Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan daerah
x	**xx**	**02**		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
x	xx	02	01	Pembangunan rumah jabatan
x	xx	02	02	Pembangunan rumah dinas
x	xx	02	03	Pembangunan gedung kantor
x	xx	02	04	Pengadaan mobil jabatan
x	xx	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
x	xx	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
x	xx	02	08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor
x	xx	02	10	Pengadaan Mebeleur
x	xx	02	11	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin persandian dan Peningkatan Kapasitas Personal Persandian
x	xx	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
x	xx	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
x	xx	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
x	xx	02	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
x	xx	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
x	xx	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala .....
x	xx	02	31	Pemeliharaan Mesin, jaringan dan pengembangan PABX
x	xx	02	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Sekda
Asisten
Kabag
Sekpri Bagian Perekonomian
Sekpri Bagian Terkait
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
x	xx	02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
x	xx	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
x	xx	02	43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
x	xx	02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
x	xx	02	45	Pembangunan Sarana Gedung Kantor
x	xx	02	46	Penyusunan Dokumen Lingkungan
x	xx	02	47	Pembangunan Gedung Kantor (BK)
x	xx	02	48	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung/Kantor (BK)
x	xx	02	49	Pembangunan Sarana Gedung Kantor (BK)
x	xx	02	50	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
x	xx	03		**Program** Peningkatan Disiplin Aparatur
x	xx	03	01	Pengadaan mesin/kartu absensi
x	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
x	xx	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan
x	xx	03	04	Pengadaan pakaian KORPRI
x	xx	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
x	xx	03	06	Dst.....
x	xx	04		**Program fasilitasi pindah /purna tugas** PNS
x	xx	04	01	Pemulangan pegawai yang pensiun
x	xx	04	02	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
x	xx	04	03	Pemindahan tugas PNS
x	xx	04	04	Dst.....
x	xx	05		**Program Peningkatan Kapasitas** Sumber Daya Aparatur
x	xx	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal
x	xx	05	02	Sosialisasi peraturan perundang undangan
x	xx	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
x	xx	05	04	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi (LPJ)
x	xx	05	05	Gelar Budaya Kerja
x	xx	05	06	Evaluasi Kelembagaan
x	xx	05	07	Penyusunan Analisis Jabatan PNS
x	xx	05	08	Penyusunan Analisis Beban Kerja
x	xx	05	09	Gelar Budaya Kerja
x	xx	05	10	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
x	xx	05	11	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Keeamatan
x	xx	05	12	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
x	xx	05	13	Pameran Pelayanan Publik
x	xx	05	14	Penguatan Reformasi Birokrasi
x	xx	05	15	Pemberdayaan Penyidik PNS
x	xx	05	16	Pembinaan Satpol PP dan Banpol PP
x	xx	05	17	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
x	xx	05	18	Suskalak B Bagi Perangkat Desa/Kelurahan
x	xx	05	19	Diklat aplikasi sistem informasi
x	xx	05	20	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah
x	xx	05	21	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur TAPD
x	xx	05	22	Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan
x	xx	05	23	Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
x	xx	05	24	Jambore dan Hari Jadi Sat Pol PP
x	xx	05	27	Diklat Peningkatan Kinerja Aparatur Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah
x	xx	05	28	Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP
x	xx	05	29	Kajian Evaluasi Jabatan
x	xx	05	30	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
x	xx	05	31	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi PNS Daerah
x	xx	05	32	Evaluasi Kelembagaan
x	xx	05	33	Diklat aplikasi administrasi Pemerintah Desa
x	xx	05	34	Diklat fungsional penyuluh pertanian
x	xx	05	36	Pembekalan kesempatan Satpol PP

Sekda
Asisten
Kabag Hukum
SKPD/ Bagian Perkaitan
SKPD/ Bagian Terkait
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
x	xx	05	37	Pemberdayaan Penyidik PNS
x	xx	05	38	Bimbingan Teknis inovasi sistem pengelolaan aset
x	xx	05	39	Penataan organisasi perangkat daerah
x	**xx**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kenangan**
x	xx	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
x	xx	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
x	xx	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
x	xx	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
x	xx	06	05	Monitoring evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri
x	xx	06	06	Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pemerintahan
x	xx	06	07	Administrasi Pelaporan
x	xx	06	08	Penyusunan SAKIP
x	xx	06	09	Monitoring Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
x	xx	06	10	Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Barang Daerah
x	xx	06	11	Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
x	**xx**	07		**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur**
x	xx	07	01	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
x	xx	07	02	Fasilitasi Penghargaan mantan Kepala Desa/ Aparat Desa
x	xx	07	03	Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
x	xx	07	04	Penyusunan Rancangan Perda tentang Desa
x	xx	07	05	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Desa
1				**URUSAN WAJIB**
1				**PENDIDIKAN**
1	01	15		**Program Pendidikan Anak Usia Dini**
1	01	15	01	Pembangunan gedung sekolah
1	01	15	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	15	03	Pembangunan ruang kelas sekolah
1	01	15	04	Penambahan ruang guru sekolah
1	01	15	05	Pembangunan ruang locker siswa
1	01	15	06	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1	01	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain
1	01	15	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1	01	15	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parlor
1	01	15	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1	01	15	11	Pembangunan ruang ibadah
1	01	15	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1	01	15	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	15	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1	01	15	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1	01	15	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1	01	15	17	Pengadaan pakaian olahraga
1	01	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1	01	15	19	Pengadaan mebeluer sekolah
1	01	15	20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1	01	15	21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1	01	15	22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1	01	15	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1	01	15	24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	15	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1	01	15	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1	01	15	27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1	01	15	28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1	01	15	29	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain

Sekda

Asisten

Kabag

SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.

KODE				URAIAN
1	01	15	30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1	01	15	31	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	15	32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1	01	15	33	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1	01	15	34	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1	01	15	35	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	15	36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1	01	15	37	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1	01	15	38	Pemeliharaan rutin/berkala mebelner sekolah
1	01	15	39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1	01	15	40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1	01	15	41	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mabilitas sekolah
1	01	15	42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1	01	15	43	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	15	44	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1	01	15	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1	01	15	46	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1	01	15	47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
1	01	15	48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
1	01	15	49	Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
1	01	15	50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1	01	15	51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	15	52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1	01	15	53	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1	01	15	54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
1	01	15	55	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instatasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	15	56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1	01	15	57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
1	01	15	58	Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini
1	01	15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	15	60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	15	61	Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	15	62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	15	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	15	64	Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	15	65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	15	66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	15	67	Pembangunan Pagar/Talud PAUD
1	01	15	68	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
1	01	16		**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**
1	01	16	01	Pembangunan gedung sekolah
1	01	16	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	16	03	Penambahan ruang kelas sekolah
1	01	16	04	Penambahan ruang guru sekolah
1	01	16	05	Pembangunan laboratoriuin dan ruang praktikum sekolah dan ruang penunjang lainnya
1	01	16	06	Pembangunan ruang locker siswa
1	01	16	07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1	01	16	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1	01	16	09	Perubangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	16	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1	01	16	11	Pembangunan ruang ibadah
1	01	16	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1	01	16	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	16	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Sekda

Asisten

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.

KODE				URAIAN
1	01	16	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1	01	16	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1	01	16	17	Pengadaan pakaian olahraga
1	01	16	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1	01	16	19	Pengadaan mebeluer sekolah
1	01	16	20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1	01	16	21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1	01	16	22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1	01	16	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1	01	16	24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	16	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1	01	16	26	Pemeliharaan rutia/berkala ruang guru sekolah
1	01	16	27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1	01	16	28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1	01	16	29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1	01	16	30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	16	31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1	01	16	32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1	01	16	33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1	01	16	34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	16	35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1	01	16	36	Pemeliharaan rutin/herkala alat praktik dan peraga siswa
1	01	16	37	Pemeliharaan rutia/berkala mebeluer sekolah
1	01	16	38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1	01	16	39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah taagga sekolah
1	01	16	40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1	01	16	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1	01	16	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	16	43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1	01	16	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1	01	16	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1	01	16	46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1	01	16	47	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas selmlah
1	01	16	48	Rehabilitasi sedang/herat ruang locker siswa
1	01	16	49	Rehabilitasi sedang/berat sarana alahraga
1	01	16	50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1	01	16	51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	16	52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1	01	16	53	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1	01	16	54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
1	01	16	55	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	16	56	Rehabilitasi sedaag/berat sarana afr hersih dan sanitary
1	01	16	57	Pelatihan kompetensi tenaga peadidik
1	01	16	58	Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi
1	01	16	59	Pelatihan Penyusunan kurikulum
1	01	16	60	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1	01	16	61	Pembinaan SMP Terbuka
1	01	16	62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
1	01	16	63	Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesaatren Salaflyah dan Satuan Pendidikan non-Islam Setara SD dan SMP
1	01	16	64	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah
1	01	16	65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1	01	16	66	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
1	01	16	67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1	01	16	68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	01	16	69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar
1	01	16	70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1	01	16	71	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)
1	01	16	72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1	01	16	73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
1	01	16	74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
1	01	16	75	Penyediaan beasiswa transisi
1	01	16	76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1	01	16	77	Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
1	01	16	78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	16	79	Olympiade MIPA SD/SMP
1	01	16	80	Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)
1	01	16	81	Pembinaan Gugus Sekolah Dasar
1	01	16	82	Pembangunan Pagar dan Talud SD/SMP
1	01	16	83	Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah
1	01	16	84	Fasilitasi Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah
1	01	16	85	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
1	01	16	86	Penunjang Operasional BOS
1	01	16	87	Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP
1	01	16	88	Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar
1	01	16	89	Lembaga Kepulauan TerpencilKantin Kejujuran SD dan SMP (BK)
1	01	16	90	Peningkatkan Kopetensi Guru Olah Raga
1	01	16	94	OperasioanI BOS Daerah Madrasah Diniyah (BK)
1	01	16	95	Pendidikan Kecakapan Hidup
1	01	17		Program Pendidikan Menengah
1	01	17	01	Pembangunan gedung sekolah
1	01	17	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	17	03	Penambahan ruang kelas sekolah
1	01	17	04	Penambahan ruang guru sekolah
1	01	17	05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan Lain-lain)
1	01	17	06	Pembangunan ruang locker siswa
1	01	17	07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1	01	17	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1	01	17	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasililas parkir
1	01	17	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1	01	17	11	Pembangunan ruang ibadah
1	01	17	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1	01	17	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	17	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1	01	17	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1	01	17	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1	01	17	17	Pengadaan pakaian olahraga
1	01	17	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1	01	17	19	Pengadaan mebeluer sekolah
1	01	17	20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1	01	17	21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1	01	17	22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1	01	17	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1	01	17	24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	17	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1	01	17	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1	01	17	27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1	01	17	28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Sekda
Asisten
Kabag

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
1	01	17	29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1	01	17	30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	17	31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1	01	17	32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1	01	17	33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1	01	17	34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	17	35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1	01	17	36	Pemeliharaan rutin/berkala alat perakit dan peraga siswa
1	01	17	37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
1	01	17	38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1	01	17	39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1	01	17	40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1	01	17	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1	01	17	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	17	43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1	01	17	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1	01	17	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1	01	17	46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1	01	17	47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
1	01	17	48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
1	01	17	49	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1	01	17	50	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	17	51	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1	01	17	52	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1	01	17	53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
1	01	17	54	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	17	55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1	01	17	56	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
1	01	17	57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidikan
1	01	17	58	Pelatihan penyusunan kurikulum
1	01	17	59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1	01	17	60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk dacrah-dacrah perdesaan, terpencil dan Kepulauan
1	01	17	61	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
1	01	17	62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
1	01	17	63	Penyelenggaraan Paket C setara SMU
1	01	17	64	Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
1	01	17	65	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1	01	17	66	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
1	01	17	67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1	01	17	68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
1	01	17	69	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1	01	17	70	Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK
1	01	17	71	Pembangunan pagar dan Talud
1	01	17	72	Olimpiade MiPA SMA
1	01	17	73	Lomba Kopetensi Siswa Berprestasi
1	01	17	74	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
1	01	17	75	Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
1	01	17	76	Penunjang Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA dan SMK
1	01	17	77	Pendidikan Kecakapan Hidup
1	01	17	78	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK)
1	01	17	79	Pameran Produk Unggulan SMK
1	01	17	80	Lomba Jawara SMK
1	01	17	81	Lomba Kopetensi Siswa Berprestasi

Paraf Hierarki
Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
1	01	17	98	Penunjang Operasional BOS SLTA
1	01	17	98	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (BK)
1	01	18		**Program Pandidikan Non Formal**
1	01	18	01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1	01	18	02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
1	01	18	03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1	01	18	04	Pengembangan pendidikan kcaksaraan
1	01	18	05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1	01	18	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
1	01	18	07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
1	01	18	08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
1	01	18	09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1	01	18	10	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
1	01	18	11	Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal
1	01	18	12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
1	01	18	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	18	14	Pendamping Pcnyclcnggaraan Ujian Nasional Paket A,B dan C
1	01	18	15	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)
1	01	18	16	Hari Anak Nasional (HAN)
1	01	18	17	Jambore PTK - PNF
1	01	18	18	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNF
1	01	18	19	Pengembangan model keaksaraan berbasis teknologi
1	01	18	20	Taman bacaan masyarakat berbasis elektronik
1	01	18	21	Ujicoba desa vokasi
1	01	18	22	Pembinaan dan Penguatan Lembaga Rumah Pintar Mini (RPM)
1	01	18	23	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI) (BK)
1	01	18	24	Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi (BK)
1	01	18	31	Pendidikan Kewirausahaan
1	01	18	32	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI) (BK)
1	01	18	33	Jambore PTK - PNF (BK)
1	01	18	34	Ketrampilan Kecakapan Hidup
1	01	18	35	Seleksi Tutor Berprestasi (BK)
1	01	19		**Program Pendidikan Lnar Biasa**
1	01	19	01	Pembangunan gedung sekolah
1	01	19	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	19	03	Penambahan ruang kelas sekolah
1	01	19	04	Penambahan ruang guru sekolah
1	01	19	05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
1	01	19	06	Pembangunan ruang locker siswa
1	01	19	07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1	01	19	08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1	01	19	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	19	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1	01	19	11	Pembangunan ruang ibadah
1	01	19	12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1	01	19	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	19	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1	01	19	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1	01	19	16	Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
1	01	19	17	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1	01	19	18	Pengadaan mebeluer sekolah
1	01	19	19	Pengadaan perlengkapan sekolah
1	01	19	20	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1	01	19	21	Pengadaan saraha mobilitas sekolah

Sekda
Asisten
Kabag
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
1	01	19	22	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1	01	19	23	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	19	24	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1	01	19	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1	01	19	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1	01	19	27	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1	01	19	28	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1	01	19	29	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	19	30	Pemeliharaan rutin/berkata ruang unit kesehatan sekolah
1	01	19	31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1	01	19	32	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1	01	19	33	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	19	34	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1	01	19	35	Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar
1	01	19	36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1	01	19	37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
1	01	19	38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1	01	19	39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1	01	19	40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1	01	19	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1	01	19	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1	01	19	43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1	01	19	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1	01	19	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1	01	19	46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium an ruang praktikum sekolah
1	01	19	47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
1	01	19	48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
1	01	19	49	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1	01	19	50	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1	01	19	51	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1	01	19	52	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1	01	19	53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
1	01	19	54	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1	01	19	55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1	01	19	56	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
1	01	19	57	Pelatihan Penyusunan kurikulum
1	01	19	58	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1	01	19	59	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	19	60	Pembinaan Sekolah Inklusi
1	01	19	61	Perlombaan Anak Berkebutuhan Khusus
1	01	20		Program Peningkatan Mntn Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1	01	20	01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1	01	20	02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1	01	20	03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1	01	20	04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
1	01	20	05	Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
1	01	20	06	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)
1	01	20	07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1	01	20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1	01	20	09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1	01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Paraf Hierarki
Sekda
Asisten
Kabag Hukum

Paraf Koordinasi
SKPD/ Bagian Perekonomian
SKPD/ Bagian Terkait
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
1	01	20	11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
1	01	20	12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	20	13	Penilaian Angka Kredit Jabatan Pungsional
1	01	20	14	Seleksi Guru Berprestasi
1	01	20	15	pengembangan SIM pendidik dan tenaga kependidikan
1	01	20	16	Penunjang Program Bermutu
1	01	20	17	penillaian kinerja guru
1	01	20	18	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
1	01	20	19	Workshop publikasi ilmiah
1	01	20	20	Seleksi Calon Kepala Sekolah
1	01	20	21	Olimpiade sains guru
1	01	20	22	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1	01	20	23	Penguatan kepengawasan sekolah
1	01	20	24	Seleksi Guru Berprestasi (BK)
1	01	20	25	pengembangan keprofesian berkelanjutan
1	01	21		**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**
1	01	21	01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
1	01	21	02	Pengembangan minat dan budaya baca
1	01	21	03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1	01	21	04	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
1	01	21	05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1	01	21	06	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
1	01	21	07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
1	01	21	08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1	01	21	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1	01	21	10	monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	21	12	penyelenggaraan lomba perpustakaan
1	01	21	13	pembinaan tenaga pengelola perpustakaan sekolah
1	01	21	14	pengadaan buku rumah pintar dan TBM
1	01	21	16	penyelenggaraan implementasi budaya baca
1	01	22		**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**
1	01	22	01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1	01	22	02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1	01	22	03	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
1	01	22	04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
1	01	22	05	Pembinaan dewan Pendidikan
1	01	22	06	Pembianaan Komite Sekolah
1	01	22	07	Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1	01	22	08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1	01	22	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	01	22	10	Sinkronisasi perencanaan pendidikan
1	01	22	11	Penyusunan Lakip dan profil pendidikan
1	01	22	12	Peningkatan manajemen pendidikan (pengelolaan aset,keuangan,kepegawaian dan kelembagaan)
1	01	22	13	Penyelenggaraan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas)
1	01	22	14	Whorkshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
1	01	22	15	Penunjang program grindulu mapan
1	01	22	16	Penyusunan quesioner dan pengkalan data pendidikan
1	01	22	17	Pengembangan program adiwiyata
1	01	22	18	Workshop standar pelayanan minimal bidang pendidikan
1	01	22	19	Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Sekda
Asisten
Kasbg Hukum

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	01	22	20	Penunjang operasional bantuan siswa miskin (BSM)
1	02			**KESEHATAN**
1	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1	02	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1	02	15	02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1	02	15	03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
1	02	15	04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1	02	15	05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1	02	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	15	07	Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten
1	02	15	10	Pengadaan Obat Penunjang Pelayanan Kesehatan
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1	02	16	01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
1	02	16	02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1	02	16	03	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1	02	16	04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
1	02	16	05	Perbaikan gizi masyarakat
1	02	16	06	Revitalisasi sistem kesehatan
1	02	16	07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
1	02	16	08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
1	02	16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat
1	02	16	10	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
1	02	16	11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
1	02	16	12	Peningkatan pelayanan dan penangguiangan masalah kesehatan
1	02	16	13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1	02	16	14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1	02	16	15	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1	02	16	16	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
1	02	16	17	Pelayanan kesehatan dasar Puskesmas
1	02	16	18	Peningkatan SDM Kesehatan
1	02	16	19	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	16	21	Pembinaan kesehatan anak , remaja dan usila
1	02	16	22	Peningkatan deteksi dini tumbuh kembang anak
1	02	16	24	Peningkatan Kapasitas Poskesdes
1	02	16	26	Peningkatan sarana dan regulasi Kesehatan
1	02	16	27	Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
1	02	16	28	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap Plus (BK)
1	02	16	29	Perluasan Fungsi Polindes menjadi Poskesdes
1	02	16	30	Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN
1	02	16	31	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1	02	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan
1	02	17	01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1	02	17	02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1	02	17	03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
1	02	17	04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
1	02	17	05	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1	02	17	06	Pemantauan Distribusi Obat di Toko Obat dan Apotik
1	02	17	07	Dst .....
1	02	18		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1	02	18	01	Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	02	18	02	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
1	02	18	03	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri
1	02	18	04	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
1	02	18	05	Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait
1	02	18	06	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1	02	18	07	Dst.....
1	02	19		**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	02	19	01	Pengembangan media promosi dari informasi sadar hidup sehat
1	02	19	02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1	02	19	03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
1	02	19	04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
1	02	19	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	19	06	Pengadaan media promosi kesehatan
1	02	19	07	Pengembangan psyandu lansia
1	02	19	08	Pengembangan Desa Siaga
1	02	19	11	Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
1	02	19	12	Pengembangan Taman Posyandu
1	02	19	13	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1	02	20		**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**
1	02	20	01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1	02	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1	02	20	03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1	02	20	04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1	02	20	05	Penanggulangan Gizi lebih
1	02	20	06	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1	02	20	07	Penanggulangan gizi buruk
1	02	20	08	Pengadaan MP Asi dan obat penunjang Gizi
1	02	20	10	Penanganan gizi buruk pada balita dan ibu hamil
1	02	20	11	Peningkatan pemanfaatan ASI eksklusif
1	02	20	12	Pengadaan MP Asi dan obat penunjang Gizi (BK)
1	02	21		**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**
1	02	21	01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1	02	21	02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1	02	21	03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1	02	21	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	21	05	Pengembangan Kabupaten Sehat
1	02	21	09	Penyelenggaraan Lingkungan Sehat
1	02	21	10	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1	02	21	11	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan
1	02	22		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**
1	02	22	01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1	02	22	02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
1	02	22	03	Pengadaan vaksin penyakit menular
1	02	22	04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1	02	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1	02	22	06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
1	02	22	07	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
1	02	22	08	Peningkatan Imunisasi
1	02	22	09	Peningkatan Surveillanee Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1	02	22	10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1	02	22	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	22	12	Pemberantasan Penyakit Menular

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3.

KODE				URAIAN
1	02	23		**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**
1	02	23	01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1	02	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1	02	23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1	02	23	04	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
1	02	23	05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
1	02	23	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	23	07	Pengembangan dan Pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan
1	02	23	08	Pengembangan Puskesmas ISO
1	02	24		**Program Pelayanan Kesehatan Pendndnh Mlskin**
1	02	24	01	Pelayanan operasi katarak
1	02	24	02	Pelayanan kesehatan THT
1	02	24	03	Pelayanan operasi bibir sumbing
1	02	24	04	Pelayanan sunatan masal
1	02	24	05	Penanggulangan ISPA
1	02	24	06	Penanggulangan penyakit cacingan
1	02	24	07	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
1	02	24	08	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
1	02	24	09	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu
1	02	24	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	24	11	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Pacitan
1	02	24	12	JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
1	02	24	13	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
1	02	25		**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantn dan Jaringannya**
1	02	25	01	Pembangunan puskesmas
1	02	25	02	Pembangunan puskesmas pembantu
1	02	25	03	Pengadaan puskesmas perairan
1	02	25	04	Pengadaan puskesmas keliling
1	02	25	05	Pembangunan posyandu
1	02	25	07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1	02	25	08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1	02	25	09	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan
1	02	25	10	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
1	02	25	11	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
1	02	25	12	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
1	02	25	13	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
1	02	25	14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1	02	25	15	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1	02	25	16	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
1	02	25	17	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
1	02	25	18	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu
1	02	25	19	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap
1	02	25	20	Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas
1	02	25	21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
1	02	25	22	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan
1	02	25	23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	25	24	Perluasan gedung gudang farmasi kabupaten
1	02	25	25	Rehab Sedang/Berat Puskesmas
1	02	25	26	Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Medis/Paramedis
1	02	25	27	Pembangunan Peskesdes (DAK)
1	02	25	28	Peningkatan Polindes menjadi Poskesdes
1	02	25	29	Pembangunan rumah dinas medis/paramedis
1	02	25	30	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak asap rokok di Dinas Kesehatan

Sekda

Asisten

SKPD/ Bagian Terkait
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
1	02	25	31	Pembangunan IPAL
1	02	25	32	Pengadaan Peralatan Kesehatan
1	02	25	33	Rehabilitasi Instalasi Gudang Farmasi
1	02	25	34	Pengadaan Alat Kedokteran Diagnostik dan Penunjang Medik
1	02	25	35	Peningkatan Sarana Alat Kesehatan
1	02	25	36	Pengadaan Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling
1	**02**	**26**		**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rnmah Sakit Paru-paru/Rnmah Sakit Mata**
1	02	26	01	Pembangunan rumah sakit
1	02	26	02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
1	02	26	03	Pembangunan gudang obat/apotik
1	02	26	04	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (WIP,VIP, Kelas 1, II danIII)
1	02	26	05	Pengembangan ruang gawat darurat
1	02	26	06	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU
1	02	26	07	Pengembangan ruang operasi
1	02	26	08	Pengembangan ruang terapi
1	02	26	09	Pengembangan ruang isolasi
1	02	26	10	Pengembangan ruang bersalin
1	02	26	11	Pengembangan ruang inkubator
1	02	26	12	Pengembangan ruang bayi
1	02	26	13	Pengembangan ruang rontgen
1	02	26	14	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
1	02	26	15	Pembangunan kamar jenazah
1	02	26	16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1	02	26	17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit
1	02	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1	02	26	19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1	02	26	20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1	02	26	21	Pengadaan mebeuleur rumah sakit
1	02	26	22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1	02	26	23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1	02	26	24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1	02	26	25	Pengembangan tipe rumah sakit
1	02	26	26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	26	27	Pengadaan alat pengolah limbah Rumah Sakit
1	02	26	28	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok melalui pengembangan ruang rawat inap, pengadaan alat kesehatan dan/atau pengadaan perlengkapan ruang pasien untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok
1	02	26	29	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1	02	26	30	Pembangunan ruang rawat inap kelas III
1	02	26	31	Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit
1	02	26	32	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
1	02	27		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rnmah Sakit/Rnmah Sakit Jiwa/Rnmah Sakit Paru-paru/Rnmah Sakit Mata**
1	02	27	01	Pemeiiharaan rutin/berkala rumah sakit
1	02	27	02	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
1	02	27	03	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
1	02	27	04	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas 1, II dan III)
1	02	27	05	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
1	02	27	06	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU
1	02	27	07	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
1	02	27	08	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
1	02	27	09	Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi

Sekda
Asisten
Keleg Hukum
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	02	27	10	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
1	02	27	11	Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
1	02	27	12	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
1	02	27	13	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
1	02	27	14	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
1	02	27	15	Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
1	02	27	16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1	02	27	17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1	02	27	18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
1	02	27	19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit
1	02	27	20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
1	02	27	21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	27	22	Dst.....
1	02	28		**Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**
1	02	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1	02	28	02	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
1	02	28	03	Kemitraan pengolahan limtuah rumah sakit
1	02	28	04	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
1	02	28	05	Kemitraan Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
1	02	28	06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
1	02	28	07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
1	02	28	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	28	09	Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat
1	02	28	10	Kunjungan Dokter Speslalis Tamu
1	02	28	11	Pendidikan dan Pelatihan sumber daya rumah sakit
1	02	29		**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita**
1	02	29	01	Penyuluhan kesehatan anak balita
1	02	29	02	Imunisasi bagi anak balita
1	02	29	03	Rekruitmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
1	02	29	04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1	02	29	05	Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
1	02	29	06	Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita
1	02	29	07	Monitoring, evatuasi dan pelaporan
1	02	29	08	Peningkntan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak
1	02	30		**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**
1	02	30	01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1	02	30	02	Rekruitmen tenaga perawat kesehatan
1	02	30	03	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
1	02	30	04	Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
1	02	30	05	Pembangunan panti asuhan
1	02	30	06	Pelayanan kesehatan Lansia
1	02	30	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	30	08	Pembinaan Lansia
1	02	31		**Program Pengawasan dan Pengendalinn Kesehatan Makanan**
1	02	31	01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
1	02	31	02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1	02	31	03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
1	02	31	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	02	31	05	Pengawasan makanan dan minuman di tempat-tempat umum/wisata
1	02	32		**Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**
1	02	32	01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1	02	32	02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak
1	02	32	03	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Sekda
Asisten
Keseg
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
SKPD/ Bagian Terkait
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
1	02	32	04	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
1	02	33		**Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD**
1	02	33	01	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan
1	02	33	02	Pengadaan Sarana dan prasarana rumah sakit
1	03			**PEKERJAAN UMUM**
1	03	15		**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**
1	03	15	01	Perencanaan pembangunan jalan
1	03	15	02	Survei kontur jalan dan jembatan
1	03	15	03	Pembangunan jalan
1	03	15	04	Perencanaan pembangunan jembatan
1	03	15	05	Pembangunan jembatan
1	03	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	16		**Pregram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong**
1	03	16	01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1	03	16	02	Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
1	03	16	03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1	03	16	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	16	05	Pemeliharaan Rutin saluran drainase kota
1	03	16	06	Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
1	03	16	08	Normalisasi Saluran Drainase
1	03	16	09	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (BK)
1	03	17		**Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**
1	03	17	01	Perencanaan turap/talud/bronjong
1	03	17	02	Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
1	03	17	03	Pembangunan turap/talud/bronjong
1	03	17	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	17	05	Dst.....
1	03	18		**Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
1	03	18	01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1	03	18	02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1	03	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1	03	18	04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1	03	18	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	18	06	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
1	03	18	07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (BK)
1	03	18	08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (BK)
1	03	19		**Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong**
1	03	19	01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1	03	19	02	Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1	03	19	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	20		**Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan**
1	03	20	01	Inspeksi kondisi jalan
1	03	20	02	Inspeksi kondisi jembatan
1	03	20	03	Evaluasi dan pelaporan
1	03	20	04	Dst .....
1	03	21		**Prograia Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan**
1	03	21	01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
1	03	21	02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
1	03	21	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	21	04	Dst .....

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD Bagian Perekonomian

SKPD Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	03	22		**Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan**
1	03	22	01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan
1	03	22	02	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
1	03	22	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	22	04	Perencanaan Prasarana Transportasi Daerah
1	03	23		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**
1	03	23	01	Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
1	03	23	02	Pembangunan gedung workshop
1	03	23	03	Pembangunan laboratorium kebinamargaan
1	03	23	04	Pengadaan alat-alat berat
1	03	23	05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1	03	23	06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1	03	23	07	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan
1	03	23	08	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
1	03	23	09	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
1	03	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1	03	23	11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1	03	23	12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1	03	23	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	23	14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Alat-alat Berat
1	03	24		**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**
1	03	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1	03	24	02	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
1	03	24	03	Perencanaan pembangunan reservoir
1	03	24	04	Perencanaan pembangunan pintu air
1	03	24	05	Perencanaan normalisasi saluran sungai
1	03	24	06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum
1	03	24	07	Pembangunan reservoir
1	03	24	08	Pembangunan pintu air
1	03	24	09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
1	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1	03	24	11	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
1	03	24	12	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
1	03	24	13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
1	03	24	14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1	03	24	15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1	03	24	16	Pemberdayaan petani pemakai air
1	03	24	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	24	18	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
1	03	24	19	Peningkatan Jaringan Irigasi
1	03	24	20	Perbaikan Saluran Tutup (Trotoar) Kota
1	03	24	21	Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi
1	03	24	22	Pemeliharaan rutin normalisasi saluran sungai
1	03	24	23	Perbaikan Saluran Tutup (Trotoar) Kota (BK)
1	03	24	24	Penanganan Infrastruktur Irigasi (BK)
1	03	24	25	Operasional dewan sumber daya air
1	03	25		**Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**
1	03	25	01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1	03	25	02	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1	03	25	03	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1	03	25	04	Pembangunan sumur-sumur air tanah
1	03	25	05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
1	03	25	06	Peningkatan distribusi penyediaan air baku

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD Bagian Pemeriksa

SKPD Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	03	25	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	25	08	Dst .....
1	03	26		**Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi** Snngai, Danan dan Sumber Daya **Air Lainnya**
1	03	26	01	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
1	03	26	02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
1	03	26	03	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
1	03	26	04	Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
1	03	26	05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
1	03	26	06	Peningkatan konservasi air tanah
1	03	26	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	26	08	Operasional Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
1	03	27		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**
1	03	27	01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1	03	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1	03	27	03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
1	03	27	04	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
1	03	27	05	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
1	03	27	06	Pengembangan sistem distribusi air minum
1	03	27	07	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
1	03	27	08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
1	03	27	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	28		**Program Pengendalian Banjir**
1	03	28	01	Pembangunan reservoir pengendali banjir
1	03	28	02	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1	03	28	03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1	03	28	04	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir
1	03	28	05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
1	03	28	06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
1	03	28	07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
1	03	28	08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
1	03	28	09	Pembangunan prasarana pengaman pantal
1	03	28	10	Pembangunan tanggul pemecah ombak
1	03	28	11	Monitoring , evaluasi dan pelaporan
1	03	28	12	Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
1	03	28	13	Perencanaan Daerah Sungai (Bina Marga)
1	03	29		**Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbnh**
1	03	29	01	Perencanaan pengembangan infrastuktur
1	03	29	02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1	03	29	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	29	04	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
1	03	29	05	Pembangunan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL)
1	03	29	06	Pembangunan Lingkungan Monumen Panglima Sudirman
1	03	29	07	Pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau
1	03	29	08	Peningkatan taman kota dan jalur hijau
1	03	29	09	Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)
1	03	29	10	Fematangan Lahan dan Urukan
1	03	29	11	Pembangunan obyek wisata
1	03	29	12	Pembangunan gapura tugu batas kota
1	03	29	13	Pembangunan Tugu
1	03	29	14	Pembangunan sarana olah raga
1	03	29	15	Riview RPJM bidang cipta karya
1	03	29	16	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) (BK)

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemeriksa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	03	29	17	Peningkatan taman kota dan jalur hijau (BK)
1	03	29	18	Pembangunan kawasan wisata
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktnr Perdesaaan
1	03	30	01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan
1	03	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan
1	03	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (DID/DAK)
1	03	30	04	Pembangunan pasar perdesaan
1	03	30	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
1	03	30	06	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
1	03	30	07	Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaan
1	03	30	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	03	30	09	Pengadaan bahan infrastuktur desa
1	03	30	10	Penanganan infrastruktur bidang pekerjaan umum
1	03	30	11	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan (BK)
1	03	30	12	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (BK)
1	03	30	13	Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pada Dinas Marga dan Pengairan
1	03	31		Program Dst .....
1	04			PERUMAHAN
1	04	15		Program Pengembangan Permnahan
1	04	15	01	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
1	04	15	02	Penyuluhan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
1	04	15	03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
1	04	15	04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
1	04	15	05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
1	04	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1	04	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
1	04	15	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	04	15	09	Peningkatan jalan lingkungan
1	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan
1	04	16	01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
1	04	16	02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
1	04	16	03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
1	04	16	04	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
1	04	16	05	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
1	04	16	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	04	16	07	Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan
1	04	16	08	Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
1	04	16	09	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
1	04	16	10	Pembangunan sarana MCK
1	04	16	11	Operasinnal Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP)
1	04	17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1	04	17	01	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
1	04	17	02	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
1	04	17	03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
1	04	17	04	Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
1	04	17	05	Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum

Sekda

Asisten

Kabag

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	04	17	06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
1	04	17	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	04	17	08	Fasilitasi dan stimulan Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)
1	04	18		**Prograra Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial**
1	04	18	01	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
1	04	18	02	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
1	04	18	03	.....
1	04	18	04	Dst .....
1	04	19		**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**
1	04	19	01	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1	04	19	02	Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1	04	19	03	Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung
1	04	19	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1	04	19	05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1	04	19	06	Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
1	04	19	07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1	04	19	08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1	04	19	09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1	04	19	10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1	04	19	11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1	04	19	12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1	04	19	13	.....
1	04	19	14	Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)
1	04	20		**Program Pengelolaan Areal Pemakaman**
1	04	20	01	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman
1	04	20	02	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
1	04	20	03	Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
1	04	20	04	Koordinasi penataan areal pemakaman
1	04	20	05	Pemberian perijinan pemakaman
1	04	20	06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
1	04	20	07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1	04	20	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	04	20	09	Dst .....
1	04	21		**Program Penyediaan Sanitasi**
1	04	21	01	Penanggulangan kemiskinan perkotaan
1	04	22		**Program Penyediaan Sanitasi**
1	04	22	01	Sanitasi Berbasis Masyarakat
1	04	30		**Program Bnglnungan sehat pemmahan**
1	04	30	01	Peningkatan jalan lingkungan
1	05			**PENATAAN RUANG**
1	05	15		**Program Perencanaan Tata Ruang**
1	05	15	01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
1	05	15	02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1	05	15	03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1	05	15	04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
1	05	15	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1	05	15	06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD/ Bagian Pemakaman	
SKPD/ Bagian Terkait 1. _____ 2. _____ 3.	

KODE				URAIAN
1	05	15	07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
1	05	15	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
1	05	15	09	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
1	05	15	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
1	05	15	11	Revisi rencana tata ruang
1	05	15	12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
1	05	15	13	Survey dan pemetaan
1	05	15	14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
1	05	15	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
1	05	15	16	Penyusunan Raperda tentang RDTR
1	05	15	17	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
1	05	16		Program Pemanfaatan Ruang
1	05	16	01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
1	05	16	02	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
1	05	16	03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1	05	16	04	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
1	05	16	05	Survey dan pemetaan
1	05	16	06	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
1	05	16	07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1	05	16	08	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1	05	16	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
1	05	16	10	Fasilitasi program pengembangan kota hijau (P2KH)
1	05	16	11	Rencana pemanfaatan lahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
1	05	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Rnang
1	05	17	01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1	05	17	02	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
1	05	17	03	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1	05	17	04	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1	05	17	05	Pengawasan pemanfaatan ruang
1	05	17	06	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1	05	17	07	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1	05	17	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	05	17	09	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang
1	05	17	10	Sosiahsasi undang-undang penataan ruang
1	06			**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**
1	06	15		Program Pengembangan Data/Informasi
1	06	15	01	Pengumpulan, updating, dan analisis data infomasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1	06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1	06	15	03	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
1	06	15	04	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
1	06	15	05	Penyusunan profile daerah
1	06	15	06	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis informasi teknologi
1	06	15	07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi informasi
1	06	15	08	Penyusunan data informasi pembangunan daerah
1	06	15	09	Discrsifikasi dan inovasi teknologi perbaikan mutu hasil perikanan mendukung pengembangan desa pesisir tangguh
1	06	15	10	Whorkshop Kelitbangan Kabupaten Pacitan
1	06	15	11	Penelitian nilai jual obyek pajak tanah dan bangunan dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	06	16		**Program Kerjasama Pembangunan**
1	06	16	01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
1	06	16	02	Koordinasi kerjasam pembangunan antar daerah
1	06	16	03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
1	06	16	04	Koordinasi dalam pemecahanan masalah-masalah daerah
1	06	16	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	16	06	Fasilitasi tilik warga gerbang emas terpadu
1	06	16	07	Fasilitasi TMMD/Karya Bhakti TNI
1	06	17		**Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**
1	06	17	01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
1	06	17	02	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
1	06	17	03	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
1	06	17	04	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
1	06	17	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	17	06	Dst .....
1	06	18		**Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tnmbuh**
1	06	18	01	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1	06	18	02	Koordinasi penetapan rencana rata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
1	06	18	03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1	06	18	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	18	05	Pasilitasi Perencanaan fisik dan prasarana dikawasan strategis dan cepat tumbuh
1	06	19		**Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**
1	06	19	01	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
1	06	19	02	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
1	06	19	03	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
1	06	19	04	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1	06	19	05	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
1	06	19	06	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
1	06	19	07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
1	06	19	08	Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran
1	06	19	09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1	06	19	10	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
1	06	19	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	19	12	Dst .....
1	06	20		**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**
1	06	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1	06	20	02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
1	06	20	03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
1	06	20	04	Penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja
1	06	20	05	Peningkatan sumber daya aparatur perencanaan pembangunan daerah
1	06	21		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
1	06	21	01	Pengembangan partsipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1	06	21	02	Penyusunan rancangan RPJPD
1	06	21	03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
1	06	21	04	Penetapan RPJPD
1	06	21	05	Penyusunan rancangan RPJMD
1	06	21	06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1	06	21	07	Penetapan RPJMD
1	06	21	08	Penyusunan rancangan RKPD

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1	06	21	10	Penetapan RKPD
1	06	21	11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1	06	21	12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertangggung Jawaban (LKP)
1	06	21	13	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1	06	21	14	Sosialisasi hasil penelitian
1	06	21	15	Penyusunan rancangan dan pengendalian penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau Kab. Pacitan Tahun 2009
1	06	21	16	Penyusunan Rancangan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
1	06	21	17	Publikasi dan profile cukai tembakau
1	06	21	18	Koordinasi penanggulangan kemiskinan
1	06	21	19	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
1	06	21	20	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	21	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	22	Koordinasi perencanaan dan penyusunan laporan kinerja pembangunan daerah
1	06	21	23	Penyusunan RENSTRA Tahun 2016-2021
1	06	21	40	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	41	Peningkatan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah
1	06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1	06	22	01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
1	06	22	02	Penyusunan indikator ekonomi daerah
1	06	22	03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
1	06	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1	06	22	05	Penyusunan tabel input output daerah
1	06	22	06	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
1	06	22	07	Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
1	06	22	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	22	10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Anti Proverty Program (APP)
1	06	22	11	Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai kpd Masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan bidang cukai pada bidang ekonomi
1	06	22	12	Penyusunan disparitas wilayah
1	06	22	13	Penyusunan Database infrastruktur perekonomian daerah
1	06	22	14	Penyusunan Bisnis Plan Tahun 2009
1	06	22	17	Penyusunan analysis indikator ekonomi daerah
1	06	22	18	Penyusunan database infrastruktur pertanian
1	06	22	19	Fasilitasi bidang ekonomi
1	06	22	21	Penyusunan Buku Nilai Tukar Petani
1	06	22	23	Penyusunan ILOR
1	06	22	24	Study Komperatif Sektor Ekonomi di Kabupaten Pacitan
1	06	22	25	Penyusunan Masterplan Pertanian
1	06	22	26	Rencana zonasi, pengelolaan,aksi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
1	06	22	27	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau
1	06	22	28	Penyusunan prolil potensi ekonomi unggulan
1	06	23		Program Perencanaan Sosial dan Bndaya
1	06	23	01	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
1	06	23	02	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
1	06	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1	06	23	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang Sosial Budaya
1	06	23	05	Fasilitasi Bidang Sosial Budaya
1	06	23	06	Penyusunan indikator daerah Bidang Sosial Budaya
1	06	23	07	Penyusunan buku indeks kedalaman kemiskinan
1	06	23	08	Fasilitasi Kabupaten Sehat
1	06	23	09	Koordinasi penanggulangan kemiskinan

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Perencanaan

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	06	23	10	Penanggulangan kemiskinan program gerakan terpadu mensejahterakan masyarakat pacitan (GRINDULU MAPAN)
1	06	23	11	Penyusunan database bidang sosial budaya
1	06	23	15	Updating database bidang sosial budaya
1	06	23	16	Penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya
1	06	24		**Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**
1	06	24	01	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
1	06	24	02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1	06	24	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	24	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah
1	06	24	05	Fasilitasi Perencanaan Prasarana Wilayah
1	06	24	06	Updating Drainase Perkotaan
1	06	24	07	Updating data jalan kabupaten
1	06	24	08	Updating data jalan perkotaan
1	06	24	09	Penyusunan RPIJM bidang kebinamargaan dan pengairan serta review RPIJM bidang keciptakaryaan
1	06	24	10	Perencanaan drainase perkotaan
1	06	24	11	Database jalan poros desa
1	06	24	12	Database jalan lingkungan perkotaan
1	06	24	13	Penyusunan study kelayakan instalasi pengelolaan limbah tinja IPLT
1	06	24	14	Penyusunan rencana konservasi tanah desa (RKTD)
1	06	24	15	Fasilitasi program TMMD / karya bhakti TNI
1	06	24	16	Pendukung program/kegiatan TMMD Reguler
1	06	24	20	Fasilitasi perencanaan prasarana perhubungan, pengairan dan sumber daya alam
1	06	24	21	Fasilitasi perencanaan prasarana pemukiman dan lingkungan hidup
1	06	25		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana**
1	06	25	01	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana
1	06	25	02	Koordinasi pembangunan daemh rawan bencana
1	06	25	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	06	25	04	Dst .....
1	07			**PERHUBUNGAN**
1	07	15		**Program Pembangunan Prasarana dan Pasilitas Perhubungan**
1	07	15	01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1	07	15	02	Penyusunan kebijakan, norma,standar dan prosedur bidang perhubungan
1	07	15	03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1	07	15	04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
1	07	15	05	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
1	07	15	06	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
1	07	15	07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
1	07	15	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	07	15	09	Intensifikasi PAD bidang Perhubungan
1	07	15	10	Fasilitasi Pelayanan Bidang Perhubungan
1	07	16		**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Pasilitas LW**
1	07	16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1	07	16	02	Rehabilitasi/pemeliharan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
1	07	16	03	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
1	07	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
1	07	16	05	Pemeliharaan APILL (Traffic Light dan Warning Light)
1	07	16	06	Rehabilitasi/Pemeliharaan fasilitas perparkiran
1	07	17		**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait: 1. 2. 3.
Kabag Hukum	

KODE				URAIAN
1	07	17	01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
1	07	17	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
1	07	17	03	Kagiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
1	07	17	04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
1	07	17	05	Kegiatan pengendaliam disiplin pengaperasian angkutan umum dijalan raya
1	07	17	06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
1	07	17	07	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
1	07	17	08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
1	07	17	09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
1	07	17	10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
1	07	17	11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
1	07	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
1	07	17	13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
1	07	17	14	Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1	07	17	15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1	07	17	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
1	07	17	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	07	17	18	Pembinaan usaha perbengkelan kendaraan bermotor
1	07	17	19	Pengumpulan Data Base Bidang Perhubungan
1	**07**	**18**		**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubnngan**
1	07	18	01	Pembangunan gedung terminal
1	07	18	02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
1	07	18	03	Pembangunan jembatan penyeberangan gedung terminal
1	07	18	04	Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut
1	**07**	**19**		**Program Pengeadalian dan Pengamanan Lalu Lintas**
1	07	19	01	Pengadnan rambu-rambu lalu lintas
1	07	19	02	Pengadaan marka jalan
1	07	19	03	Pengadaan pagar pengaman jalan
1	07	19	04	Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas
1	07	19	05	Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas
1	07	19	06	Pengadaan garis kejut
1	07	19	08	Pengendalian dan penanggulangan keeelakaan lalulintas
1	**07**	**20**		**Program Peaingkutan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**
1	07	20	01	Pembangunan balai pengujian kendaraan berraotor
1	07	20	02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
1	07	20	03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
1	07	20	04	Dst .....
1	**07**	**21**		**Program Dst .....**
1	**08**			**LINGKUNGAN HIDUP**
1	**08**	**15**		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**
1	08	15	01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1	08	15	02	Penyediaan prasmna dan sarana pengelolaan persampahan
1	08	15	03	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
1	08	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1	08	15	05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1	08	15	06	Bimbingan teknis persampahan
1	08	15	07	Peningkalan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

Paraf koordinasi

Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf koordinasi

SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait: 1. ____ 2. ____ 3.	

KODE				URAIAN
1	08	15	08	Kerjasama pengelolaan sampah
1	08	15	09	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
1	08	15	10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1	08	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1	08	15	12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	15	13	Dst .....
1	08	16		**Program** Pengendalian Pencemaran dan **Perusakan** Llngknngan Hidnp
1	08	16	01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
1	08	16	02	Koordinasi penilaian langit biru
1	08	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan
1	08	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1	08	16	05	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
1	08	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3
1	08	16	07	Pengkajian dampak lingkungan
1	08	16	08	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
1	08	16	09	Penimgkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
1	08	16	10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
1	08	16	11	Pengembangan produksi ramah lingkungan
1	08	16	12	Penyusunan kebijakan pengendalian peneemaran dan perusakan lingkungan hidup
1	08	16	13	Koordimasi penyusunan AMDAL
1	08	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1	08	16	15	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
1	08	16	16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	16	17	Koordimasi Penilaian Adiwiyata di Kabupaten Pacitan
1	08	16	18	Penerapan Manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)
1	08	16	19	Pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi dibidang usaha terkait lingkungan hidup
1	08	17		**Program** Perllndu**ngan** dan **Konservasi** Snmber **Daya Alam**
1	08	17	01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
1	08	17	02	Pantai dan Laut Lestari
1	08	17	03	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut
1	08	17	04	Pengemtuangan Ekowlsata dan Jasa Lingkungan
1	08	17	05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1	08	17	06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1	08	17	07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
1	08	17	08	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
1	08	17	09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1	08	17	10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
1	08	17	11	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut
1	08	17	12	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
1	08	17	13	Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan
1	08	17	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1	08	17	15	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
1	08	17	16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	17	17	Dst .....
1	08	18		**Program Rehabilitasi** dan **Pemulihan Cadangan Snmber** Daya **Alam**
1	08	18	01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
1	08	18	02	Pereneanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1	08	18	03	Rehabilitasi hutan dan lahan

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Perkaitan

SKPD/ Bagian Terkait
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	08	18	04	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
1	08	18	05	Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
1	08	18	06	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
1	08	18	07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
1	08	18	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	18	09	Pembangunan sarana pemulihan sumber air
1	08	19		**Prograua Peningkatan Knalitas dan Akses Informasi Somber Daya Alam dan Lingkungan Hidnp**
1	08	19	01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1	08	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan
1	08	19	03	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
1	08	19	04	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
1	08	19	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	19	06	Dst .....
1	08	20		**Program Peningkatan Pengeodalian Polosi**
1	08	20	01	Pengujian emisi kendaraan bermotor
1	08	20	02	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
1	08	20	03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
1	08	20	04	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
1	08	20	05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
1	08	20	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	20	07	Dst .....
1	08	21		**Prograun Pengembangan Ekowlsata dan Jasa Lingkungan dl Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hntan**
1	08	21	01	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi
1	08	21	02	Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
1	08	21	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	21	04	Dst .....
1	08	22		**Program Pengendalian Kebakaran Hntan**
1	08	22	01	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
1	08	22	02	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
1	08	22	03	Koordinasi pengendalian kebakaran hutnn
1	08	22	04	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
1	08	22	05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
1	08	22	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	08	22	07	Dst .....
1	08	23		**Program Pengelolaan dan Rehabilitaai Kkoslstem Pesisir dan Lant**
1	08	23	01	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1	08	23	02	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
1	08	23	03	Dst .....
1	08	24		**Program Pengelolaan Rnang Terbnka Hljan (RTH)**
1	08	24	01	Penyusunan kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
1	08	24	02	Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
1	08	24	03	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
1	08	24	04	Penyusunan program pengembahan RTH
1	08	24	05	Penataan RTH
1	08	24	06	Pemeliharaan RTH

Paraf Koordinasi

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

Paraf Koordinasi

SKPD/ Bagian Perekonomian

SKPD/ Bagian Terkait

1. _____

2. _____

3. _____

KODE				URAIAN
1	08	24	07	Pengembangan taman rekreasi
1	08	24	08	Pengawasan dan pengendalian RTH
1	08	24	09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1	08	24	10	Monitoring dan evaluasi
1	**09**			**PERTANAHAN**
1	**09**	**15**		**Program Pembangnnan Sistem Pendaftaran Tanah**
1	09	15	01	Penyusunan sistem pendaftaran tanah
1	09	15	02	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
1	09	15	03	Dst .....
1	**09**	**16**		**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengganaan dan Pemanfaatan Tanah**
1	09	16	01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
1	09	16	02	Koordinasi kerjasam pembangunan antar daerah
1	09	16	03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
1	09	16	04	Koordinasi dalam pemecahanan masalah-masalah daerah
1	09	16	05	Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1	09	16	06	Pengadaan tanah untuk aset Pemda
1	09	16	07	Perencanaan pengadaan tanah
1	09	16	08	Penyusunan Data Base Tanah Aset Pemerintah Daerah
1	09	16	09	Pensertilikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah
1	09	16	10	Fasilitasi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan aset Pemerintah Daerah
1	09	16	11	Penanaman Rupabumi Wilayah
1	09	16	12	Pelaksanaan pengadaan tanah (BK)
1	**09**	**17**		**Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan**
1	09	17	01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1	09	17	02	Dst .....
1	**09**	**18**		**Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**
1	09	18	01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
1	09	18	02	Dst .....
1	**09**	**19**		**Program Dst .....**
1	**10**			**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**
1	**10**	**15**		**Program Penataan Administrasi Kependadnkan**
1	10	15	01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
1	10	15	02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK
1	10	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
1	10	15	04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
1	10	15	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
1	10	15	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1	10	15	07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
1	10	15	08	Pengembangan data base kependudukan
1	10	15	09	Penyusunan kebijakan kependudukan
1	10	15	10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1	10	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan
1	10	15	12	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
1	10	15	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	10	15	15	Penataan dan pengelolaan arsip
1	10	15	16	Peningkatan pelayanan KK,KTP dan Akta Catatan Sipil
1	10	15	17	Pengadaan komputer program SIAK
1	10	15	19	Pemeliharaan rutin/berkala software database dan pelaporan kependudukan dan

Sekda

Asisten

Kabag

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	10	15	20	Bintek petugas verifikasi / penerbitan dokumen kependudukan tingkat desa
1	10	15	21	Validasi data (DP4) Pilkada Bupati
1	10	15	22	Penyusunan SPP dan SOP
1	11			**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
1	11	15		Program **Kesetaraan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**
1	11	15	01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
1	11	15	02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
1	11	15	03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1	11	15	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	11	15	05	Dst .....
1	11	16		Program **Pengnatan Kelembagaan Pengarusntamaan Gender dan Anak**
1	11	16	01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
1	11	16	02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
1	11	16	03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
1	11	16	04	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
1	11	16	05	Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak
1	11	16	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1	11	16	07	Evaluasi pelaksanaan PUG
1	11	16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
1	11	16	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	11	16	10	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi perempuan dalam rangka penguatan ekonomi keluarga di lingkungan industri rokok dan perkebunan tembakau (cukai)
1	11	16	11	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan
1	11	16	12	Sosialisasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO)
1	11	16	13	Pendataan gender
1	11	17		Program **Peningkatan Kualitas Hidnp dan Perlindungan Pmempuan**
1	11	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1	11	17	02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
1	11	17	03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
1	11	17	04	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
1	11	17	05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
1	11	17	06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
1	11	17	07	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
1	11	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1	11	17	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	11	17	10	Sosialisasi kota layak anak
1	11	17	11	Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Kota Layak Anak
1	11	17	12	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1	11	17	13	Sosialisasi penghapusan trafiking anak (Child Trafficking)
1	11	18		Program **Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**
1	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
1	11	18	02	Kegiatan pendidikan dan petatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Paraf Koordinasi

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait
1. _____
2. _____
3. _____

Paraf Bisnata

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

KODE				URAIAN
1	11	18	03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1	11	18	04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
1	11	18	05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
1	11	18	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	11	18	07	Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W-KSS)
1	11	18	08	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu
1	11	19		**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**
1	11	19	01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambiian keputusan
1	11	19	02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
1	11	19	03	**Dst .....**
1	12			**KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**
1	12	15		**Program Keluarga Berencana**
1	12	15	01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1	12	15	02	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
1	12	15	03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
1	12	15	04	Promosi Pelayanan Khiba
1	12	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana
1	12	15	06	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
1	12	15	07	Penyusunan data kependudukan dan keluarga
1	12	15	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Program KB (DAK)
1	12	15	09	Operasional PPKBD dan sub PPKBD
1	12	15	10	Penunjang Harganas
1	12	15	11	Peningkatan kapasitas kader
1	12	15	12	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan (BKB,BKR BKL)
1	12	15	13	Pendataan dan Pengolahan data keluarga
1	12	15	14	Pengadann Sarana Prasarana Pengelolaan Program KB
1	12	15	15	Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga
1	12	15	16	Biaya Operasinnal dan Pemeliharaan
1	12	15	18	Sharing DAK Kependudukan
1	12	15	19	Pengadaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi KB Pasca Salin (BK)
1	12	15	21	Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin
1	12	16		Program **Kesehatan Reprodnksi Remaja**
1	12	16	01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1	12	16	02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
1	12	16	03	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja
1	12	17		**Program Pelayanan Kontrasepsi**
1	12	17	01	Pelayanan konseling KB
1	12	17	02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1	12	17	03	Pengadaan alat kontrasepsi
1	12	17	04	Pelayanan KB medis operasi
1	12	17	05	Pelayanan kontrasepsi KB Keliling
1	12	17	06	Pelayanan konseling pra pelayanan KB
1	12	18		**Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri**
1	12	18	01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1	12	18	02	Pengelolaan data dan informasi program KB
1	12	18	03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1	12	18	04	Pembinaan ketahanan keluarga terpadu bersumberdaya masyarakat
1	12	18	05	Penguatan pengasuhan anak (parenting) bagi keluarga

Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1.	
		2.	
		3.	

KODE				URAIAN
1	12	18	06	Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1	12	18	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1	12	18	12	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi
1	12	18	13	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri kecil hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil teambakau melalui pelatihan Nata De Coco
1	**12**	**19**		**Program Promosi Kesehatan Ibn, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan dl Masyarakat**
1	12	19	01	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
1	12	19	02	Dst .....
1	12	20		**Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**
1	12	20	01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
1	12	20	02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
1	12	20	03	Sosialisasi kesehatan reproduksi PUS di lingkungan sosial pabrik rokok
1	12	21		**Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS**
1	12	21	01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
1	12	21	02	Dst .....
1	12	22		**Program Pengembangan Baban Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**
1	12	22	01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1	12	22	02	Dst .....
1	12	23		**Program Penylapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**
1	12	23	01	Pelatihan tenaga pendamping kekompok bina keluarga di kecamatan
1	12	23	02	Dst .....
1	12	24		**Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandn-PADU**
1	12	24	01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1	12	24	02	Dst .....
1	13			**SOSIAL**
1	13	15		**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejabteraan sosial (PMKS) Lainnya**
1	13	15	01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1	13	15	02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
1	13	15	03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1	13	15	04	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1	13	15	05	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1	13	15	06	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1	13	15	09	Verifikasi dan validasi data kepersetaan JKN
1	13	15	13	Pengiriman Anak ke PSPA Batu Malang
1	13	16		**Program Pelayanan dan Rebabilitasi Kesejahteraan Sosial**
1	13	16	01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
1	13	16	02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Sekda

Asisten

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	13	16	03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1	13	16	04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
1	13	16	05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
1	13	16	06	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
1	13	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1	13	16	08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1	13	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1	13	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1	13	16	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Data Rumah Tidak Layak Huni
1	13	16	12	Pemberian bantuan tambahan gizi anak yatim piatu dan anak cacat dalam panti
1	13	16	13	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional
1	13	16	15	Rehabilitasi taman makam pahlawan bunga bangsa Pacitan dan monumen Tumpak Rinjing
1	13	16	16	Rehabilitasi rumah perintis kemerdekaan
1	13	17		**Program Pembinaan Anak Terlantar**
1	13	17	01	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
1	13	17	02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
1	13	17	03	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
1	13	17	04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
1	13	17	05	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
1	13	17	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	13	**18**		**Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**
1	13	18	01	Pendataan penyandang carat dan penyakit kejiwaan
1	13	18	02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan taruma
1	13	18	03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1	13	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1	13	18	05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
1	13	18	06	Pemberdayaan penyandang masalah keseajahteraan sosial (PMKS)
1	13	18	08	Pelatihan budidaya ternak kambing dan pemberian bantuan ternak kambing bagi penyandang cacat produktif (penderita kusta)
1	13	**19**		**Program Pembinaan Panti Asnban /Panti Jompo**
1	13	19	01	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
1	13	19	02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo
1	13	19	03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
1	13	19	04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
1	13	19	05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
1	13	19	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	13	19	07	Peinbinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
1	13	20		**Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapldana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**
1	13	20	01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1	13	20	02	Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
1	13	20	03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Paraf Koordinasi

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAK
1	13	20	04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
1	13	20	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	13	20	06	Sosialisasi tentang dampak narkoba dan HIV/AIDS
1	13	21		**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejabteraan Sosial**
1	13	21	01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1	13	21	02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1	13	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1	13	21	04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
1	13	21	05	Pemberdayaan peran aktif karang taruna dalam dunia usaha
1	13	21	06	Pengiriman Anak ke PSPA Batu perberdayaan WKSBM pelaku kesejahteraan sosial masyarakat
1	13	21	07	Pendataan PMKS dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
1	13	21	08	Operasional Program Keluarga Harapan
1	13	21	09	Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Rekrutmen Siaga Bencana)
1	13	21	10	Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
1	13	22		**Pemberdayaan Fakir Miskin**
1	13	22	01	Penelitian Pemberdayaan UMK bagi masyarakat nelayan guna mendukung pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Pacitan
1	14			**KETENAGAKERJAAN**
1	14	15		**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**
1	14	15	01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1	14	15	02	Pembangunan balai latihan kerja
1	14	15	03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
1	14	15	04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
1	14	15	05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
1	14	15	06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
1	14	15	07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
1	14	15	08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
1	14	15	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	14	15	10	Pelatihan ketrampilan dan bantuan sarana kerja masyarakat di sekitar daerah industri hasil tembakau dan/ atau daerah penghasil bahan baku industri penghasil tembakau (cukai)
1	14	15	11	Pelatihan dan ketrampilan kerja masyarakat di sekitar daerah industri hasil tembakau dan/ atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (cukai)
1	14	15	12	Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri kecil
1	14	16		**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**
1	14	16	01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1	14	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1	14	16	03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan
1	14	16	04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1	14	16	05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
1	14	16	06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
1	14	16	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	14	16	08	Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi
1	14	16	09	Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL AKAD dan AKAN

Paraf Koordinasi

Sekda

Asisten

Kabag

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	14	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut teanggap cepat dan kejadian luar biasa
1	14	17		**Program** Perlindungan dan **Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**
1	14	17	01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
1	14	17	02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1	14	17	03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1	14	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1	14	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1	14	17	06	Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
1	14	17	07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
1	14	17	08	Monitoring,cvaluasi dan pelaporan
1	14	17	09	Penetapan upah minimum Kabupaten
1	14	17	10	Pemberdayaan lembaga tenaga kerja
1	14	17	11	Pemeriksaan dan pengujian peralatan di perusahaan
1	14	18		**Program Dst .....**
1	15			**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
1	15	15		**Program** Penciptaan **Ddim Usaha-nsaba KecU Menengah Yang Kondnksif**
1	15	15	01	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
1	15	15	02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
1	15	15	03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah
1	15	15	04	Pendirian unit penanganan pengaduan
1	15	15	05	Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
1	15	15	06	Perencanaan, koordinasi, dan pengembanan Usaha Kecil Menengah
1	15	15	07	Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
1	15	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
1	15	15	09	Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
1	15	15	10	Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
1	15	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	15	15	12	Penilaian Kesehatan Bagi KSP/USP
1	15	15	13	Penilaian klasifikasi koperasi
1	15	15	14	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)
1	15	15	15	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi UMKM di lingkungan industri hasil tembakau dan /atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui peningkatan SDM bagi pelaku UMKM
1	**15**	**16**		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Kennggnlan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**
1	15	16	01	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
1	15	16	02	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
1	15	16	03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	16	04	Peningkatan kerjasama di bidang **HAKI**
1	15	16	05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
1	15	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1	15	16	07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
1	15	16	08	Sosialisasi **HAKI** kepada Usaha Mikro Kedl Nfenengah
1	15	16	09	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	16	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	15	16	11	Pameran Produk Unggulan
1	15	16	12	Bimbingan Teknis Kewirausahaan
1	15	16	14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1.	
		2.	
		3.	

KODE				URAIAN
1	15	16	16	Pemantauan dan pembinaan industri kecil menengah
1	15	16	26	Study banding UKM
1	**15**	**17**		**Program Pengembangan Sistem Pendnknng Usaha Bagi Usaha Mihro KecU Menengah**
1	15	17	01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
1	15	17	02	Pengembangan klaster bisnis
1	15	17	03	Koordimasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
1	15	17	04	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	17	05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Keeil Menengah
1	15	17	06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	17	07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
1	15	17	08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
1	15	17	09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	17	10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
1	15	17	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	15	17	12	Fasilitasi Dana Bergulir
1	15	17	13	Pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk UMKM dan Kperasi sebagai penunjang Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT)
1	15	18		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**
1	15	18	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
1	15	18	02	Peningkatan sarana dam prasana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
1	15	18	03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
1	15	18	04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
1	15	18	05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
1	15	18	06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
1	15	18	07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
1	15	18	08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
1	15	18	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	15	18	10	Diklat Pengawasan Koperasi
1	15	18	11	Diklat akuntansi bagi juru buku koperasi
1	15	18	12	Bimbingan teknis manajemen koperasi, laporan keuangan dan motifasi organisasi (pos daya)
1	15	18	13	Pemberdayaan Koperasi Pos Daya
1	15	18	14	Revitalisasi Koperasi
1	15	18	15	Diklat teknis perkoperasian
1	15	18	16	Pembinaan Kelembagaan Koperasi
1	15	18	17	Monitoring Data ODS (Online Data System) Koperasi
1	15	18	18	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian (BK)
1	15	18	19	Pembinaan Kelembagaan Koperasi (BK)
1	15	19		**Program Dst .....**
1	16			**PENANAMAN MODAL**
1	16	15		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
1	16	15	01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
1	16	15	02	Pengembangan potensi unggulan daerah
1	16	15	03	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
1	16	15	04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendataan pelaksanaan investasi PMDN/PMA
1	16	15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Paraf

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
1	16	15	06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi
1	16	15	07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
1	16	15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1	16	15	09	Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
1	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi
1	16	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	16	15	12	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
1	16	16		**Program Peningkatan, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**
1	16	16	01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
1	16	16	02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
1	16	16	03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal
1	16	16	04	Pengembangan System Informasi Peuanaman Modal
1	16	16	05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
1	16	16	06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
1	16	16	07	Kajian kebijakan penanaman modal
1	16	16	08	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
1	16	16	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	16	16	10	Sosialisasi Pelayanan Perizinan
1	16	16	11	Pendampingan ISO
1	16	16	13	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
1	16	16	15	Pengembangan System Informasi amanajemen pelayanan perizinan terpadu satu pintu
1	16	16	16	Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1	16	16	17	Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1	16	16	18	Penatalaksanaan pelayanan perijinan terpadu satu pintu
1	16	16	19	Penyusunan SOP, SPP dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1	16	17		**Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah**
1	16	17	01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
1	16	17	02	Dst .....
1	17			**KEBUDAYAAN**
1	17	15		**Program Pengembangan Nilai Budaya**
1	17	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1	17	15	02	Penatagunaan naskah kuno nusantara
1	17	15	03	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
1	17	15	04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
1	17	15	05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1	17	15	06	Pengiriman duta seni dan gelar seni budaya Paeitan di luar daerah
1	17	15	07	Pelestarian kesenian tradisional daerah
1	17	15	08	Pekan wisata budaya Paeitan
1	17	15	09	Fesitval karya tari, lagu daerah dan festival rontek
1	17	15	10	Pelestarian dan aktualisasi situs purbakala
1	17	15	11	Pelaksanaan dan aktualisasi adat budaya daerah
1	17	16		**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**
1	17	16	01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1	17	16	02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
1	17	16	03	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1	17	16	04	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya bakal daerah
1	17	16	05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1	17	16	06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1	17	16	07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah

Pasaf Hierarki
Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa
SKPD/ Bagian Terkait
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	17	16	08	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
1	17	16	09	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
1	17	16	10	Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
1	17	16	11	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
1	17	16	12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
1	17	16	13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
1	17	16	14	Festifal makanan khas Pacitan
1	17	16	15	Pengembangan nilai dan geografis sejarah
1	17	17		**Program Pengelolaan Keragaman Bndaya**
1	17	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1	17	17	02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan
1	17	17	03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan
1	17	17	04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
1	17	17	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1	17	17	06	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
1	17	17	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1	17	18		**Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Bndaya**
1	17	18	01	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
1	17	18	02	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
1	17	18	03	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
1	17	18	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	17	18	05	Dst .....
1	18			**PEMUDA DAN OLAH RAGA**
1	18	15		**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemnda**
1	18	15	01	Pendataan potensi kepemudaan
1	18	15	02	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
1	18	15	03	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
1	18	15	04	Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
1	18	15	05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
1	18	15	06	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
1	18	15	07	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
1	18	15	08	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
1	18	15	09	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
1	18	15	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	18	16		**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**
1	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan
1	18	16	02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
1	18	16	03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
1	18	16	04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
1	18	16	05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
1	18	16	06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
1	18	16	07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
1	18	16	08	Pameran prestasi hasil karya pemuda
1	18	16	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	18	16	10	Pembinaan dan Pengiriman PASKIBRAKA
1	18	16	11	Bantuan sarana prasarana kegiatan generasi muda
1	18	16	12	Pelatihan kewirausahaan pemuda
1	18	17		**Program Peningkatan Upaya Pennmbnhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidnp Pemuda**
1	18	17	01	Pelatihah kewirausahaan bagi pemuda

Sekda

Asisten

Kabag

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	18	17	02	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
1	18	17	03	Dst .....
1	18	18		**Program Upaya Pencegahan Penyalahgnnaan Narkoba**
1	18	18	01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
1	18	18	02	Dst .....
1	18	19		**Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga**
1	18	19	01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
1	18	19	02	Pengembangan Sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
1	18	19	03	Pengembangan perencanaan olah raga terpadu
1	18	19	04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
1	18	19	05	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
1	18	19	06	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
1	18	19	07	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
1	18	19	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	18	19	09	Dst .....
1	18	20		**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**
1	18	20	01	Pelaksanaan identilikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1	18	20	02	Pelaksanaan identilikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
1	18	20	03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1	18	20	04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1	18	20	05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
1	18	20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1	18	20	07	Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
1	18	20	08	Pemberian penghargaan hagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
1	18	20	09	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
1	18	20	10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
1	18	20	11	Pengembangan olahraga rekreasi
1	18	20	12	Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga
1	18	20	13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
1	18	20	14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1	18	20	15	Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
1	18	20	16	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olah raga
1	18	20	17	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
1	18	20	18	Dst .....
1	18	21		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**
1	18	21	01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraqa
1	18	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1	18	21	03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1	18	21	05	Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olah raga
1	18	21	06	Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
1	18	21	07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1	18	21	08	Dst .....
1	18	22		**Program Dst .....**

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	19			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**
1	19	15		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
1	19	15	01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1	19	15	02	Pembangunan pos jaga/ronda
1	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1	19	15	04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
1	19	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan
1	19	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	19	15	07	Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
1	19	15	08	Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Kabupaten Pacitan (PAKEM)
1	19	15	09	Forum kewaspadaan dini masyarakat
1	19	15	10	Pemantauan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
1	19	15	11	Operasi tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri
1	19	15	12	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1	19	16		**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**
1	19	16	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1	19	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1	19	16	03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
1	19	16	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1	19	16	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	19	16	06	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
1	19	16	07	Penegakan Peraturan Perundang-undangan
1	19	16	08	Pengawasan dan penertiban rokok ilegal
1	19	16	09	Pembinaan,Penyuluhan dan Pengawasan pelaksanaan Perda
1	19	16	10	Penyelidikan dan Penyidikan pelanggaran Perda
1	19	16	11	Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
1	19	17		**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
1	19	17	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1	19	17	02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
1	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1	19	17	04	Forum kerukunan umat beragama
1	19	17	05	Sosialisasi Wawasan kebangsaan Bagi Tokoh Pemuda, Ormas dan Tomas
1	19	17	06	Sosialisasi pembaruan kebangsaan
1	19	17	07	Sosialisasi HAM
1	19	17	08	Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme di Kalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat
1	19	17	10	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
1	19	17	11	Kelompok Kerja Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan
1	19	18		**Program Kemitraan Pmgembangan Wawasan Kebangsaaan**
1	19	18	01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaaan
1	19	18	02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaaan
1	19	18	03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaaan
1	19	18	04	Dst .....
1	19	19		**Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**
1	19	19	01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	19	19	02	Operasional dan Pembinaan Linmas Inti
1	19	19	03	Pengamanan Daerah
1	19	20		**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**
1	19	20	01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1	19	20	02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
1	19	20	03	Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
1	19	20	04	Penyuiuhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
1	19	20	05	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan
1	19	20	06	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
1	19	20	07	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur
1	19	20	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	19	20	09	Dst .....
1	19	21		**Program Pendidikan Politik Masyarakat**
1	19	21	01	Penyuluhan kepada masyarakat
1	19	21	02	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
1	19	21	03	Komunikasi forum-forum diskusi politik
1	19	21	04	Penyusunan data base partai politik
1	19	21	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	19	21	06	Pembinaan aliansi LSM
1	19	21	07	Forkomkon bagi fungsionaris parpol, ormas, dan LSM
1	19	21	08	Forum Lintas Partai Politik
1	19	21	09	Fasilitasi bantuan keuangan kepada parpol
1	19	21	10	Tim koordinasi DKP Pemilu Putaran I
1	19	21	11	Tim koordinasi DKP Pemilu Putaran II
1	19	21	12	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu
1	19	21	13	Tim koordinasi DKP Legislatif
1	19	21	14	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pemilu
1	19	21	15	Pelatihan Pengelolaan Keuangan kepada Partai Politik
1	19	21	16	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
1	19	21	17	Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pilbup
1	19	22		**Program Pencegakan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**
1	19	22	01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1	19	22	02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dan ancaman korban bencana alam
1	19	22	03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
1	19	22	04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
1	19	22	05	Sosialisasi penanggulangan Bencana Alam
1	19	22	06	Peningkatan pelatihan dan gladi lapang ketanggap daruratan
1	19	22	07	Peningkatan askes komunikasi dan pengembangan sistem peringatan dini
1	19	22	08	Pendataan dan pemetaan wilayah resiko bencana
1	19	22	09	Pembuatan jalur evakuasi
1	19	22	10	Penanganan Bencana kekeringan
1	19	22	11	Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)
1	19	22	12	Penyusunan RAPERDA PB Kabupaten Pacitan
1	19	22	13	Operasional posko penanggulanagan bencana
1	19	22	14	Pengadaan sarana penanggulangan bencana
1	19	22	15	Pemulihan dampak bencana
1	19	22	16	Pembentukan desa tangguh bencana
1	19	22	17	Pembentukan relawan
1	19	22	18	Gladi lapang penanggulanagan bencana
1	19	22	19	Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (DALA)
1	19	22	20	Pengadaan peralatan evakuasi
1	20			**PEMERINTAHAN UMUM**

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	20	16		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1	20	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah
1	20	15	02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1	20	15	03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1	20	15	04	Rapat-rapat paripurna
1	20	15	05	Kegiatan Reses
1	20	15	06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
1	20	15	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1	20	15	08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1	20	15	09	Penyusunan dan pengelolaan keuangan pada sekretariat DPRD
1	20	15	10	Penyusunan Raperda inisiatif DPRD
1	20	15	11	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah
1	**20**	**16**		**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**
1	20	16	01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan(anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan)
1	20	16	02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
1	20	16	03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
1	20	16	04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1	20	16	05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah
1	20	16	06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1	20	16	07	Rumah Tangga Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah
1	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1	20	17	01	Penyusunan analisa standar belanja
1	20	17	02	Penyusunan standar satuan harga
1	20	17	03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
1	20	17	04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1	20	17	05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
1	20	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1	20	17	07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
1	20	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
1	20	17	09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1	20	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
1	20	17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
1	20	17	12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
1	20	17	13	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1	20	17	14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1	20	17	15	Bimbingan teknis implementasi palket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1	20	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah
1	20	17	17	Peningkatan manajemen investasi daerah
1	20	17	18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
1	20	17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1	20	17	20	Penyusunan dan pengelolaan administrasi pembukuan pembiayaan
1	20	17	21	Koordinasi dan sinkronisasi potensi pendapatan daerah
1	20	17	22	Fasilitasi penyusunan RKA, DPA dan SPD SKPD
1	20	17	23	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
1	20	17	24	Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1	20	17	25	Penyusunan draft Raperda bagi hasil pajak, retribusi daerah dan sosialisasi Perda PBB
1	20	17	26	Evaluasi Peluasan PBB
1	20	17	27	Penunjang Pelaksanaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah
1	20	17	28	Penertiban Pengelolaaan Aset Daerah
1	20	17	29	Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	20	17	30	Optimalisasi penerimaan PBB P2
1	20	17	31	Pengembangan sistem informasi PBB P2
1	20	17	32	Operasional penagihan pajak dan retribusi daerah
1	20	17	33	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Non APBD
1	20	17	34	Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsional SKPD
1	20	17	35	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD
1	20	17	36	Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian
1	20	17	37	Inventarisasi aset daerah
1	20	17	38	Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil
1	20	17	39	Sosiahsasi Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD
1	20	17	40	Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah
1	20	17	41	Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
1	20	17	42	Pemutakhiran data dan pendampingan PBB P2
1	20	17	43	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
1	20	17	44	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
1	20	17	45	Kalibrasi data, penyusunan klarifikasi tanah dan NJOP
1	20	17	47	Analisa Standar Biaya
1	20	17	48	Penyusunan Renca Kebutuhan Barang Milik Daerah
1	20	17	50	Pengamanan Aset Daerah
1	20	17	51	Pengelolaan administrasi gaji PNSD
1	20	17	52	Penyusunan profil aset daerah
1	20	17	53	Peningkatan Pengelolaan Benda-benda daerah (Karcis Daerah)
1	20	17	54	Fasilitas pemungutan pajak daerah
1	20	17	55	Fasilitas Penyusunan potensi pendapatan daerah
1	20	17	56	Fasilitasi pelaksanaan dana BK hibah dan bansos
1	20	17	57	Sistem penganggaran terintegrasi
1	20	17	58	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Keuangan Daerah
1	20	17	59	Pendataan bangunan PBB P2
1	20	17	60	Fasilitasi dan rekonsiliasi data pajak dan WP
1	20	17	61	Pemutakhiran data piutang pajak dan retribusi daerah
1	20	17	88	Fasilitas pemungutan pajak daerah
1	20	18		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Peagelolaan Kenangan Kabupaten/Kota**
1	20	18	01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
1	20	18	02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota
1	20	18	03	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
1	20	18	04	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
1	20	18	05	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
1	20	18	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana
1	20	19		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kenangan Desa**
1	20	19	01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa
1	20	19	02	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
1	20	19	03	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
1	20	19	04	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
1	20	19	05	Faslitasi administrasi pemerintahan desa
1	20	19	06	Fasilitasi pembentukan Badan Musyawarah Desa (BPD)
1	**20**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
1	20	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1	20	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1	20	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1	20	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
1	20	20	05	Inventarisasi temuan pengawasan
1	20	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

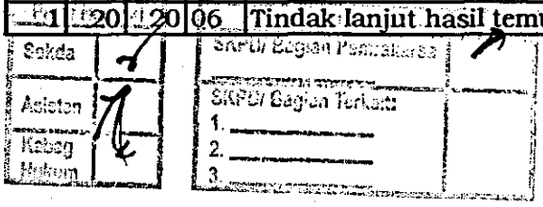

KODE				URAIAN
1	20	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1	20	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1	20	20	09	Peningkatan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan
1	20	20	10	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
1	20	20	11	Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
1	20	20	12	Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
1	20	20	13	Pembinaan UKS
1	20	20	14	Pelayanan Keprotokolan
1	20	20	15	Penanggulangan NAPZA dan Penyakit Menular Seksual (PMS)
1	20	20	16	Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Program Raskin
1	20	20	17	Fasilitasi seni budaya dan peringatan hari Besar Nasional
1	20	20	18	Koordinasi Penelolaan Kawasan Sumber Air Bersih
1	20	20	19	Sosialisasi Kelestarian Pesisir Pantai
1	20	20	20	Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat
1	20	20	21	Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan
1	20	20	22	Pembinaan Jasa Konstruksi
1	20	20	23	Penyampaian Ketentuan dibidang Cukai kepada Masyarakat yang Bertujuan agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mematuhi Ketentuan di Bidang Cukai
1	20	20	24	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1	20	20	25	Pembinaan Drum Band
1	20	20	26	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Pemuda
1	20	20	27	Pembinaan Mental Spiritual
1	20	20	28	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Olah Raga
1	20	20	29	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ
1	20	20	30	Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa
1	20	20	31	Peningkatan Koordinasi Bantuan Keagamaan
1	20	20	32	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EK-PPD)
1	20	20	33	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
1	20	20	34	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Wanita
1	20	20	35	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ)
1	20	20	36	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
1	20	20	37	Koordinasi dan Fasilitasi Industri Kecil Pedesaan
1	20	20	38	Operasional Bantuan TPAPD, BPD dan RT/RW
1	20	20	39	Peningkatan Stabilitas Harga Sembilan Bahan Pokok
1	20	20	40	Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Daerah
1	20	20	41	Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Saprodi Pertanian
1	20	20	42	Koordinasi penanganan daerah aliran sungai
1	20	20	43	Fasilitasi Gerakan pemberantasan sarang nyamuk
1	20	20	44	Fasilitasi kewaspadaan malaria di daerah endemis
1	20	20	45	Pembentukan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dl lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui pelatihan pengolahan hasil-hasil pertanian
1	20	20	46	Pembinaan Dai dan Khotib
1	20	20	47	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1	20	20	48	Pengawasan atas inventarisasi dan kekayaan milik daerah
1	20	20	49	Evaluasi AKIP/LAKIP
1	20	20	50	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
1	20	20	51	Pelaksanaan unit penggerak integritas Kabupaten Pacitan
1	20	20	52	Penanganan Ijin Perceraian bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
1	20	20	53	Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1	20	20	54	Pengorganisasian, Koordinasi dan Pemanfaatan Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep)
1	20	20	55	Penilaian Sinergitas Kecamatan
1	20	20	56	Peningkatan Pemberdayaan Lansia
1	20	20	57	Monitoring Bantuan Hibah dan Sosial

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
1	20	20	59	Monitoring evaluasi bidang lingkungan hidup
1	20	20	60	Sosialisasi bidang lingkungan hidup
1	20	20	61	Evaluasi pelaksanaan hemat energi
1	20	20	62	Pemetaan kawasan hutan
1	20	20	64	Peningkatan Profesionalisme dan Pemahaman Personil Pelaksana Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
1	20	20	65	Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat
1	20	20	67	Penyusunan Dokumen ISO 9001-2008
1	20	20	68	Sertifikasi ISO 9001-2008
1	20	20	69	Penegasan batas wilayah antar desa
1	20	20	70	Fasilitas peringatan hari jadi propinsi Jawa Timur (BK)
1	20	20	71	Koordinasi pengelolaan geopark gunungsewu geo area Pacitan
1	**20**	**21**		**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**
1	20	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1	20	21	02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
1	20	21	03	Peningkatan Kualitas Pengawas
1	20	21	04	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan
1	20	22		**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**
1	20	22	01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1	20	22	02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1	20	22	03	Dst .....
1	20	23		**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**
1	20	23	01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1	20	23	02	Peningkatan Kemudahan Komunikasi Informasi antar SKPD di Kabupaten Pacitan
1	20	23	03	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
1	20	23	04	Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat
1	20	23	05	Penerbitan Tabloid, Majalah, Leaflet dan Bookleaf
1	20	23	06	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1	20	23	07	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
1	20	23	08	Pengembangan Webside Pacitan Kab. Go.Id
1	20	23	09	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Procurement
1	20	23	10	Penyebarluasan Informasi melalui Siaran Radio
1	20	23	11	Penyediaan data/informasi dan koordinasi pengciola informasi dan dokumentasi (PPID)
1	20	23	12	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kasda
1	20	23	13	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) melalui Web Base Reporting System (WBRS) DAK
1	20	23	14	Pemeliharaan Web Site DPPKA.PacitanKab.GO.ID
1	20	23	15	Pengelolaan Data Elektronik
1	20	23	16	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Radio dan Penyiaran
1	20	24		**Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**
1	20	24	01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
1	20	24	02	Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan
1	20	25		**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**
1	20	25	01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
1	20	25	02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
1	20	25	03	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum

Paraf Koordinasi
Sekda
Asisten
Kabag Hukum

Paraf Koordinasi
SKPD/ Bagian Pencetus
SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	20	25	04	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
1	20	25	05	Pengembangan Wilayah Perbatasan
1	20	25	06	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
1	20	25	07	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
1	20	25	08	Pengembangan Wilayah Perbatasan
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1	20	26	01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1	20	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1	20	26	03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1	20	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan
1	20	26	06	Kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap peraturan perundang undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar perundang undangan daerah
1	20	26	07	Penyusunan produk hukum daerah
1	20	26	08	Himpunan Peraturan Perundang-undangan
1	20	26	09	Pertimbangan Hukum, bantuan hukum dan penyelesaian perkara hukum
1	20	26	10	Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)
1	20	26	11	Lomba Kadarkum Antar Kabupaten Kota
1	20	27		Program Penataaa Daerah Otonomi Baru
1	20	27	01	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
1	20	27	02	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dan daerah induk ke daerah pemekaran
1	20	27	03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
1	20	27	04	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
1	20	27	05	Dst .....
1	20	28		Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SPM
1	20	28	02	Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
1	20	28	03	Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal
1	20	29		Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SOP
1	20	29	01	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1	20	29	02	Sosialisasi pelayanan perizinan
1	20	29	03	Penatalaksanaan penyelenggaraan PPTSP
1	20	29	04	Penertiban IMB
1	20	29	05	Peningkatan dan penyelenggaraan pelayanan publik
1	20	29	06	Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan perijinan terpadu satu pintu (SIM PPTSP)
1	20	29	07	Pendapingan ISO
1	20	29	08	Penyusunan regulasi ketatalaksanaan administrasi pemerintahan
1	20	30		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa
1	20	30	01	Pemeliharaan Pasar Daerah
1	20	30	02	Penyempurnaan Pasar Daerah
1	20	30	03	Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah
1	20	30	04	Penyusunan prolil Pasar Daerah
1	20	30	05	Pembangunan dan peningkatan pasar daerah
1	20	36		Program Pendidikan Kedinasan
1	20	36	01	Pendidikan dan pelatihan teknis
1	20	36	02	Pendidikan dan penjenjangan struktural
1	20	36	03	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
1	20	36	04	Pembuatan buku Juknis/Juklak
1	20	36	05	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
1	20	36	06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD Bagian Pemrakarsa
SKPD Bagian Terkait:
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
1	20	36	07	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan
1	20	36	09	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
1	20	37		**Program Peningkatan Kapasitas Snmberdaya Aparatnr**
1	20	37	01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1	20	37	02	Pendidikan dan pelatihan struktur bagi PNS Daerah
1	20	37	05	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
1	20	37	12	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
1	20	37	31	Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS Daerah
1	20	38		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatnr**
1	20	38	01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1	20	38	02	Seleksi penerimaan calon PNS
1	20	38	03	Penempatan PNS
1	20	38	04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1	20	38	05	Pembangunan/pengembangan informasi kepegawaian daerah
1	20	38	06	Penyusunan dan analisis jabatan PNS
1	20	38	07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
1	20	38	08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1	20	38	09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1	20	38	10	Kajian dan kualitas materi diklat PNS
1	20	38	11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1	20	38	12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
1	20	38	13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
1	20	38	14	Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat,penyusunan silabi, prenyusunan modul dan penyusunan pedoman diklat)
1	20	38	15	Monitoring, cvaiuasi dan pelaporan
1	20	38	16	Koordinasi penyelenggaraan diklat
1	20	38	17	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
1	20	38	18	Penyusunan dan Pelaporan Data Kepegawaian
1	20	38	19	Admimistrasi Mutasi Pegawai
1	20	38	20	Administrasi Pembinaan PNS dan Tenaga Non PNS
1	20	38	21	Pelepasan Purna Tugas dan Pengurusan Kesejahteraan Pegawai
1	20	38	22	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
1	20	38	23	Pengadaan dan Pemeliharaan Kartu Identitas Pegawai
1	20	38	24	Administrasi Kepegawaian
1	20	38	25	Administrasi Pensiun
1	20	38	26	Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
1	20	38	27	Seleksi Penerimaan Praja IPDN
1	20	38	28	Orientasi Persiapan Purna Tugas
1	20	38	29	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	20	38	30	Pengelolaan laporan harta jkekayaan penyelenggara negara (LHKPN)
1	20	38	31	Sosialisasi sasaran kerja (SKP)
1	20	38	32	Pemeliharaan arsip PNS
1	20	38	33	Pengukuran kopetensi ASN
1	20	39		**Program Kelitbangan**
1	20	39	01	Penyusunan roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
1	20	39	02	Penelitian profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1	20	39	03	Bimtek penyusunan kelitbangan
1	20	39	04	Penelitian ola pangan dan gizi masyarakat berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pacitan
1	20	39	05	Penelitian potensi lestari sumber daya ikan untuk mendukung pengembangan
1	20	39	06	Kegiatan pengkajian kebijakan pemerintah desa
1	20	39	07	Penelitian kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pacitan
1	20	39	08	Aplikasi teknologi pengembangan komoditas tanaman durian melalui penerapan sistem sambung pucuk di Kabupaten Pacitan
1	20	39	09	Uji coba penerapan formula STOP RAT
1	20	39	11	Penelitian potensi komoditas unggulan bidang agrobisnis untuk mendukung

Paraf Koordinasi

Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	20	39	12	Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan
1	20	39	12	fasilitasi tim koordinasi penguatan SIDa kebupaten pacitan
1	20	39	13	penilitian strategi pelunasan akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini
1	20	39	14	penelitian pemetaan lokasi pendirian sekolah menengah dalam rangka peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan
1	20	39	15	pengkajian aktual bidang sosial budaya dan kemasyarakatan
1	20	39	16	penelitian pengembangan desa wisata berbasis potensi dan kearifan budaya lokal
1	20	39	17	penelitian strategi peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten pacitan
1	20	39	18	pengkajian aktual bidang pemerintahan dan keuangan daerah
1	20	39	19	penelitian pemetaan investasi di kabupaten pacitan
1	20	39	20	iptek bagi wilayah
1	20	39	21	aplikasi teknologibpcrekayasaan pengering jangelan
1	20	39	22	pemeliharaan aplikasi teknologi pengembangan komoditas tanaman durian melalui penetapan sistem sambung pucuk
1	20	39	23	pengkajian aktual bidang ekonomi dan pembangunan
1	20	39	24	penelitian optimalisasi badan usaha milik desa dalam peningkatan pendapatan asli daerah
1	20	39	25	penelitian pengembangan budaya baca bagi peserta didik dan masyarakat umum
1	20	39	26	Sosialisasi Arab dan Penyusunan Agenda Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2016-2021
1	20	39	27	Review Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021
1	20	39	28	Penelitian Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Berbasis Produk Kerajinan
1	20	39	29	Penelitian Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
1	20	39	30	Pengkajian Strategis Organisasi Perangkat Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
1	20	39	31	Penelitian potensi unggulan ekonomi daerah untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah
1	20	39	32	Diseminasi aplikasi teknologi perekayasaan penepung janggelan
1	20	39	33	Penelitian pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
1	20	40		**Program Pendayagunaan Aparatnr Negara Mennjn Pemerintahan yang bersih**
1	20	40	01	Pemeriksaan reguler
1	20	40	02	Pemeriksaan Kasus/Khusus
1	20	40	03	Pemeriksaan Bukti Riil (Buril)
1	20	40	04	Pemeriksaan Serentak (Pertak)
1	20	40	05	Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
1	20	41		Peningkatan Pemantanan dan Pelaksanaan Pembangnnan
1	20	41	01	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
1	20	41	02	Penyusunan Data Perusahaan Daerah
1	20	41	03	Laporan Kegiatan Perusahaan Daerah
1	20	41	04	Pembinaan Perusahaan Daerah
1	20	41	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan
1	20	41	06	Monitoring Proyek Pembangunan
1	20	41	07	Penjaringan Aspirasi Masyarakat
1	20	41	08	Penyuluhan Koperasi dan UKM
1	20	42		Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
1	20	42	01	Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
1	20	42	02	Sosialisasi Tata Naskah Dinas
1	20	42	03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	20	43		Program Evalnasi dan Pelaporan Pemerintahan
1	20	43	01	Penyusunan Laporan Penycicnggaraan Pemerintah Daerah

Paraf Koordinasi

Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi

SKPD/ Bagian Perencanaan	
SKPD/ Bagian Terkait: 1. 2. 3.	

KODE				URAIAN
1	20	44		Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1	20	44	01	Sosialisasi/Penyuluhan Tata Bayar PKB dan BBN-KB kerjasama Propinsi
1	20	44	02	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1	20	44	03	Evaluasi dan Monitoring Pendapatan Daerah
1	20	44	04	Observasi dan Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Daerah
1	20	44	05	Penyusunan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah
1	20	44	06	Peningkatan kinerja aparatur pengelola PAD
1	20	44	07	Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (lanjutan)
1	20	45		Program Intensifikasi Penerimaan Pajak Bnmi dan Bangunan (PBB)
1	20	45	01	Pengelolaan dokumen SPPT dan DHKP PBB
1	20	45	02	Penyuluhan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	20	45	03	Evaluasi dan Monitoring Peringkat PBB
1	20	45	04	Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola PBB
1	20	46		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umnm
1	20	46	01	Penunjang kegiatan camat dan lurah
1	20	59		Program Pembinaan Organisnsi Kelurahan
1	20	59	01	Lomba Kelurahan
1	20	59	02	Lomba administrasi Rukun Tetangga (RT)
1	20	59	03	Pertemuan Informal Lurah/Kasl
1	20	59	04	Rapat Koordinasi RT
1	20	59	05	Sosialisasi Sistem Pelayanan Kelurahan
1	20	59	06	Pendataan /Pembuatan Batas Wilayah RT
1	20	59	07	Penyusunan Anggaran Kelurahan
1	20	60		Program Operasional Kecamatan
1	20	60	01	Keamanan, Kebersihan dan Keindahan Kota
1	20	60	02	Monitoring Lapangan
1	20	61		Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT
1	20	61	01	Peremajaan Pengurus RT
1	20	61	02	Pembinaan admimistrasi RT
1	20	61	03	Pengadaan Buku Administrasi RT
1	20	61	04	Pemutakhiran data penduduk di Kelurahan / Kecamatan
1	20	61	05	Silaturahmi dan halai bi halai walikota dan Ketua RT
1	20	61	06	Penghargaan kepada pengurus RT yang habis masa jabatannya
1	20	61	07	Penilaian lomba pengelola terbaik administrasi RT se Kabupaten
1	20	61	08	Pengadaan Buku Petunjuk Teknis Administrasi RT
1	20	62		Program Operasional Kelurahan
1	20	62	01	Kebersihan, Keindahan dan Keamanan Kota
1	20	62	02	Monitoring Lapangan
1	20	62	03	Pembuatan Papan Petunjuk Arah ke Kelurahan
1	20	62	04	Monitoring Masalah Kependudukan
1	20	63		Program Pendidikan Kedinasan
1	20	63	01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1	20	63	02	Pendidikan penjenjangan struktural
1	20	63	03	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
1	20	63	04	Pembuatan buku Juknis/Juklak
1	20	63	05	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
1	20	63	06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
1	20	63	07	Diklat kepemimpinan tingkat II
1	20	63	08	Diklat kepemimpinan tingkat III
1	20	63	09	Pendidikan penjenjangan struktural (Diklat Pim IV)
1	20	64		Prbgram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatnr

Sekda		SKPD/ Bagian Pemeriksa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait: 1. 2. 3.	
Kabag Hukum			

KODE				URAIAN
1	20	64	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
1	20	64	02	Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1	20	64	03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
1	20	64	04	Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
1	20	64	05	dst .....
1	20	65		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatnr**
1	20	65	01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1	20	65	02	Seleksi penerimaan calon PNS
1	20	65	03	Penempatan PNS
1	20	65	04	Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1	20	65	05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1	20	65	06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
1	20	65	07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
1	20	65	08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1	20	65	09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1	20	65	10	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS
1	20	65	11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1	20	65	12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
1	20	65	13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
1	20	65	14	Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan Silabi, Penyusunan modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
1	20	65	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	20	65	16	Koordianasi penyelenggaraan diklat
1	20	65	17	Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah
1	20	65	18	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS
1	20	65	19	Penyelesaian proses SK 80% ke 100%
1	20	65	20	Pelaksanaan proses mutasi pensiun
1	20	65	21	Penyelesaian proses permintaan Karpeg
1	20	66		**Peningkataan Penataan Peraturan Kepegawaian**
1	20	66	01	Kajian Kebijakan Organisasi Pemerintah dan Kepegawaian Daerah
1	20	67		**Program Mntasi Kepangkatan**
1	20	67	01	Konsultasi Kenaikan Pangkat PNS
1	20	68		**Program Penyusunan Data Pegawai**
1	20	68	01	Penyusunan Data Pegawai
1	20	68	02	Pembuatan infassing Data Pegawai
1	20	68	03	Usulan kenaikan pangkat
1	20	68	04	Pembuatan kenaikan gaji berkala
1	20	68	05	Pengelolaan data kedisiplinan pegawai
1	20	68	06	Operasional kepegawaian
1	20	69		**Program Penyempnrnaan dan Penataan Kelembagaan**
1	20	69	01	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
1	20	70		**Program Mntasi Umum**
1	20	70	01	Proses data mutasi pegawai, KGB, THL, Pemegang Kas dan Pensiun
1	20	71		**Program Pembinaan Keagamaan**
1	20	71	01	Safari ramadhan
1	20	71	02	Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji
1	20	71	03	Pembinaan TPA dan Imam Masjid
1	20	71	04	Validasi data TPA dan Imam Masjid
1	20	71	05	Pembekalan Da'i dan Mubaligh Tim Safari Ramadhan
1	20	72		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatnr**

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	21			**KETAHANAN PANGAN**
1	21	15		**Program Pendidikan Kedinasan**
1	21	15	01	Pendidikan dan pelatihan teknis
1	21	15	02	Pendidikan penjenjangan struktural
1	21	15	03	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
1	21	15	04	Pembuatan buku juknis/juklak
1	21	15	05	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
1	21	15	06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
1	21	16		**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkehnnan)**
1	21	16	01	Penanganan Daerah Rawan Pangan
1	21	16	02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1	21	16	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1	21	16	04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
1	21	16	05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
1	21	16	06	kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
1	21	16	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
1	21	16	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
1	21	16	09	Pemafaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
1	21	16	10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
1	21	16	11	Pemantauan dan analisis akses haiga pangan pokok
1	21	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
1	21	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah
1	21	16	14	Pengembangan desa mandiri pangan
1	21	16	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
1	21	16	16	Pengembangan diverisilikasi tanaman
1	21	16	17	Pengembangan pertanian pada lahan kering
1	21	16	18	Pengembangan lumbung pangan desa
1	21	16	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
1	21	16	20	Pengembangan perbenihan/perbibitan
1	21	16	21	Pengembangan sistem informasi pasar
1	21	16	22	Penimgkatan mutu dan keamanan pangan
1	21	16	23	Koordinasi kebijakan perberasan
1	21	16	24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan
1	21	16	25	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
1	21	16	26	Penelitian dan pengembangan teknoligi bioteknologi
1	21	16	27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
1	21	16	28	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
1	21	16	29	Peningkatan produksi, produktifitas dan muru produk perkebunan, produk pertanian
1	21	16	30	Penymluhan sumber pangan alternatif
1	21	16	31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	21	16	32	Penyusunan dan analisa data pangan
1	21	16	33	Pemantapan ketahanan pangan
1	21	16	34	Pemasyarakatan gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman
1	21	16	35	Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PM-AS)
1	21	16	36	Pengembangan kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
1	21	16	37	Pemantapan desa mandiri pangan
1	21	16	38	Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan
1	21	16	39	Pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah dan sarana pendukung
1	21	18		**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**
1	21	18	18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa
1	21	18	31	Pemantapan Desa Mandiri Pangan
1	21	18	33	Penyusunan dan Analisa Data Pangan
1	21	18	34	Promosi Hasil Pertanian
1	21	18	40	Bimbingan teknis dewan ketahanan pangan tingkat Kabupaten

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3.

KODE				URAIAN
1	21	18	41	Pemantapan Ketahan Pangan
1	21	18	42	Pengembangan Pembinaan pasca program PfDRA
1	21	18	43	Pemasyarakatan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi,Berimbang dan Aman
1	21	18	45	Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)
1	22			**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
1	22	15		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perlesaan**
1	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1	22	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
1	22	15	03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1	22	15	04	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
1	22	15	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan
1	22	15	06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Besa
1	22	15	07	Pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan dan bantuan TTO
1	22	15	08	BOP Bantuan Keuangan Desa
1	22	15	09	Pro Poor Award
1	22	15	10	Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (LKD/L)
1	22	15	11	Penguatan Pokjamal Posyandu
1	22	15	12	Penilaian LPM Berprestasi (PNPM-MP)
1	22	15	13	BOP peningkatan kualitas dan kuantitas pedesaan melalui bantuan stimulan dari pemerintah dan swadaya masyarakat serta meningkatnya swadaya gotong royong
1	22	15	16	Tilik Warga Pemerintah Daerah Kabupaten Paeitan
1	22	15	17	Optimalisasi Pokja pengaduan masyarakat TKPK
1	22	15	18	Program Jalin Matra Propinsi Jawa Timur
1	22	15	19	Identilikasi Sumber Mata Air (SMA)
1	22	16		**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**
1	22	16	01	Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman
1	22	16	02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
1	22	16	03	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
1	22	16	04	Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan
1	22	16	05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
1	22	16	06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
1	22	16	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	22	16	08	Fasilitasi dan Stimulasi Pendirian BUMDES
1	22	16	09	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)
1	22	16	11	Penerapan TTG dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional
1	22	16	12	Pemberdayaan RTSM Grindulu Mapan
1	22	16	14	Pelatihan managemen pasar desa dan pendataan lembaga keuangan mikro (LKM)
1	22	16	15	Pembinaan dan administrasi program pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B)
1	22	17		**Program pmningkatan partisipasi masyarakat dalam membangnn desa**
1	22	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1	22	17	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1	22	17	03	Pemberian stimulan pembangunan desa
1	22	17	04	Monitoring,evaluasi dan Pelaporan
1	22	17	05	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1	22	17	06	Penguatan Kelembagaan Posyandu
1	22	17	07	Pelatihan Calon Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
1	22	17	08	Fasilitasi pendirian BUMDES
1	22	18		**Program peningkatan kapasitas aparatnr pemerintah desa**
1	22	18	01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan

Sekda
Asisten
Kabag

SKPD/ Bagian Pemrakarsa
SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	22	18	02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
1	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1	22	18	04	Monitoring, evaluasi dan peiaporan
1	22	18	05	Peningkatan sumber daya manusia pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
1	22	18	06	Perlombaan Desa dan Penilaian Pengelolaan APBDes Terbaik
1	22	18	07	Pendataan Profil Desa/Kelurahan
1	22	18	08	Pelatihan pemberdayaan aparatur pemerintah desa/kelurahan
1	22	18	09	Pro Poor Award
1	22	18	10	Pemberian reward pengelolaan APBDes terbaik
1	22	18	11	Sosialisasi Aset dan Kekayaan Desa
1	22	19		Program peningkatan peran perempnan di perdesaan
1	22	19	01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
1	22	19	02	TP-PKK dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
1	22	19	03	Penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)
1	23			STATISTIK
1	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1	23	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1	23	15	02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
1	23	15	03	Penyusunan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
1	23	15	04	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
1	23	15	06	Penyusunan data perkembangan ekonomi kabupaten pacitan
1	23	15	07	Penyusunan profil statistik kabupaten dan kecamatan
1	24			KEARSIPAN
1	24	15		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1	24	15	01	Pembangunan data base informasi kearsipan
1	24	15	02	Pengumpulan data
1	24	15	03	Pengklasifikasian data
1	24	15	04	Penyusunan sistem katalog data
1	24	15	05	Pengadaan sarana penyimpanan
1	24	15	06	Kajian sistem administrasi kearsipan
1	24	15	07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
1	24	15	08	Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan
1	24	15	09	Pembangunan data base informasi kearsipan
1	24	15	10	Pembinaan arsip desa
1	24	15	11	Bimbingan teknis kearsipan SKPD
1	24	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokmnen/arsip daerah
1	24	16	01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1	24	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1	24	16	03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1	24	16	04	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
1	24	16	05	Penyelamatan dan pelestarian dokumentasi daerah
1	24	17		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1	24	17	01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1	24	17	02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
1	24	17	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
1	24	17	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
1	24	18		Program peningkatan kualitas pelayanan Informasi
1	24	18	01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
1	24	18	02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip
1	24	18	03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemohon

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
1	24	18	04	Dst .....
				-
1	25			**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
1	25	15		**Program** Pengembangan **Komunikasi, Informasi** dan **Media Massa**
1	25	15	01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
1	25	15	02	Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi
1	25	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1	25	15	04	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
1	25	15	05	Pengadaan alat sudio dan komunikasi
1	25	15	06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1	25	15	07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
1	25	15	08	Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi
1	25	15	09	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
1	25	15	10	Pembinaan Jasa Titlpan dan Telekomunikasi
1	25	16		**Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi**
1	25	16	01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1	25	16	02	Dst .....
1	25	17		**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi**
1	25	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1	25	17	02	Dst .....
1	25	18		**Program kerjasama informasi** dengan **mas media**
1	25	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1	25	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1	25	18	03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1	25	18	04	Penyediaan Data/Informasi dan Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
1	26			**PERPUSTAKAAN**
1	26	15		**Program** Penyninhan **Pelayanan Perpustakaan**
1	26	15	01	Pelayanan Perpustakaan Umum
1	26	15	02	Perpustakaan Keliling
1	26	15	03	Supervisi,pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1	26	15	04	Pelaksanaan koordinasi pengembangan kepustakaan
1	26	15	05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1	26	15	06	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
1	26	15	07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
1	26	15	08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1	26	15	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah
1	26	15	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	26	16		**Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**
1	26	16	01	Pembinaan Minat Baca Kelompok-kelompok baca
1	26	16	02	Pameran dan bedah buku
1	26	16	03	Pelayanan Perpustakaan Umum
1	26	16	04	Pelayanan Perpustakaan Keliling
1	26	16	05	Pengadaan buku-buku perpustakaan umum dan keliling
1	26	16	06	Bimbingan teknis perpustakaan khusu/SKPD
2	01			**PERTANIAN**
2	01	15		**Program Peningkatan Kesejakteraan Petani**
2	01	15	01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Cukai)
2	01	15	02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Sekda
Asisten
Kabag
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
2	01	15	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2	01	15	04	Peningkatan Sistem Insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
2	01	15	05	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur
2	01	15	06	Program Anti Poverty Program (APP)
2	01	15	07	Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan (DAK)
2	01	15	08	Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau (DBHCHT)
2	01	15	09	Peningkatan kemampuan pengembangan kelembagaan petani melalui sistem kebersamaan ekonomi (SKE) (BK)
2	01	15	10	Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan (BK)
2	01	15	11	Pengembangan desa mandiri pangan dan energi (BK)
2	01	15	12	Anti Property Program (APP) (BK)
2	01	15	13	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan
2	01	15	14	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri penghasil
2	01	15	15	Standarisasi kualitas bahan baku melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi (DBHCHT)
2	**01**	**16**		**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**
2	01	16	01	Penanganan Daerah Rawan Pangan
2	01	16	02	Penyusunan data base potensi produksi pangan
2	01	16	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
2	01	16	04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
2	01	16	05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
2	01	16	06	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
2	01	16	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
2	01	16	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
2	01	16	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
2	01	16	10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
2	01	16	11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
2	01	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
2	01	16	13	Pengembangan cadangan Pangan Daerah
2	01	16	14	Pengembangan desa mandiri pangan
2	01	16	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
2	01	16	16	Pengembangan diversifikasi tanaman
2	01	16	17	Pengembangan pertanian pada lahan kering
2	01	16	18	Pengembangan lumbung pangan desa
2	01	16	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
2	01	16	20	Pengembangan perbenihan/perbibitan
2	01	16	21	Pengembangan sistem informasi pasar
2	01	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2	01	16	23	Koordinasi kebijakan perberasan
2	01	16	24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
2	01	16	25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
2	01	16	26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
2	01	16	27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
2	01	16	28	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
2	01	16	29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
2	01	16	30	Penyulnhan sumber pangan altemalif
2	01	16	31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	01	16	32	Penyusunan dan analisa datn pangan
2	01	16	33	Pemantapan ketnhanan pangan
2	01	16	34	Pemasyarakatan gerakan konsumsi pangan beragam,bergizi,seimbang dan aman
2	01	16	35	Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)
2	01	16	36	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
2	01	16	37	Pemantapan Desa Mandiri Pangan
2	01	16	38	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

Paraf Hierarki

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

Paraf Koordinasi

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait

1. _____

2. _____

3. _____

KODE				URAIAN
2	01	16	39	Pembangunan gedung cadangan pangan pemerintah dan penyediaan sarana pendukung
2	**01**	**17**		**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**
2	01	17	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2	01	17	02	Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
2	01	17	03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
2	01	17	04	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
2	01	17	05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
2	01	17	06	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
2	01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
2	01	17	08	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
2	01	17	09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
2	01	17	10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
2	01	17	11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
2	01	17	12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
2	01	17	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	01	17	14	Dst .....
2	**01**	**18**		**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan**
2	01	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2	01	18	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)
2	01	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan
2	01	18	04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2	01	18	05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2	01	18	06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
2	01	18	07	Monitoriug,evaluasi dan pelaporan
2	01	18	08	Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP)
2	01	18	09	Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan
2	01	18	10	Pcambangunan Jalan Produksi Perkebunan
2	01	18	11	Pendampingan Taman Tekhnologi Pertanian
2	**01**	**19**		**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**
2	01	19	01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2	01	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
2	01	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
2	01	19	04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
2	01	19	05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
2	01	19	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	01	19	07	Pengembangan Tanaman Nilam Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan
2	01	19	08	Peremajaan, Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
2	01	19	09	Optimalisasi dan pengembangan sumber daya sarana prasarana pengendalian OPT
2	01	19	10	Intensifikasi tanaman perkebunan
2	01	19	11	Pengembangan Agensia Hayati
2	01	19	12	Bimbingan teknis pengamatan, identilikasi dan pengendalian OPT
2	01	19	13	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku (DBHCT)

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.
3.

KODE				URAIAN
2	01	19	14	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi Daerah dilaksanakan antara lain melalui Bantuan sarana produksi tanaman perkebunan
2	01	19	15	Pengembangan usaha tani tanaman pendukung industri rokok (cengkeh)
2	01	19	16	Pengembangan tanaman holtikultura
2	01	19	17	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2	01	19	18	Rehabilitasi tanaman cengkeh
2	01	19	19	Bimbingan teknis pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT (BK)
2	01	19	20	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
2	01	20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2	01	20	01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2	01	20	02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2	01	20	03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
2	01	20	04	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan
2	01	20	05	Penyusunan program penyuluhan
2	01	20	06	Pengembangan pupuk organik
2	01	21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2	01	21	01	Pendataan masalah peternakan
2	01	21	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2	01	21	03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2	01	21	04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
2	01	21	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	01	21	09	Peningkatan sanitasi Rumah Potong Hewan (RPH) dalam rangka penyediaan daging aman,sehat,utuh dan halai (ASUH)
2	01	21	12	Pemberdyaan kader vaksinator
2	01	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan
2	01	22	01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
2	01	22	02	Pembibitan dan perawatan ternak
2	01	22	03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2	01	22	04	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
2	01	22	05	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
2	01	22	06	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
2	01	22	07	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
2	01	22	08	Pengembangan agribisnis pertcnakan
2	01	22	09	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan
2	01	22	12	Optimalisasi pemeliharaan ayam buras
2	01	22	13	Pengembangan Inseminasi Buatan
2	01	22	14	Peningkatan pengawasan bahan asal hewan (BAH) yang ASUH
2	01	23		Program peningkatan pemasaran hasil prodnksi peternakan
2	01	23	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
2	01	23	02	Fasiiitasi Kerjasama regional/nasional/intemasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
2	01	23	03	Pemeliharaan rntin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
2	01	23	04	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan
2	01	23	05	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2	01	23	06	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
2	01	23	07	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
2	01	23	08	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
2	01	23	09	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat

Sekda
Asisten
Kabag Hukum
SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.

KODE				URAIAN
2	01	23	10	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
2	01	23	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	01	23	12	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2	01	23	13	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
2	01	24		**Program peningkatan penerapan teknologi peternakan**
2	01	24	01	Penelitian dan pengembangan teknobgi peternakan tepat guna
2	01	24	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2	01	24	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2	01	24	04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
2	01	24	05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
2	01	24	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	01	24	07	Optimalisasi budidaya ternak
2	02			**KEHUTANAN**
2	02	15		**Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hntan**
2	02	15	01	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
2	02	15	02	Pengembangan hutan tanaman
2	02	15	03	Pengembangan hasil hutan non-kayu
2	02	15	04	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
2	02	15	05	Optimalisasi PNBP
2	02	15	06	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
2	02	15	07	Pengembangan industri dan pemasaran hasli hutan
2	02	15	08	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
2	02	15	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	02	15	10	Dst .....
2	02	16		**Program rehabilitasi hntan dan lahan**
2	02	16	01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
2	02	16	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2	02	16	03	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
2	02	16	04	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
2	02	16	05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
2	02	16	06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
2	02	16	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	02	16	08	Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK)
2	02	16	09	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan (DAK)
2	02	16	10	Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Sipil Teknis (DPn,Dpi,Sumur Resapan)
2	02	16	11	Penyusunan rencana kehutanan tingkat Kabupaten (RKTK)
2	02	17		**Perlindungan dan konservasi snmber daya hntan**
2	02	17	01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2	02	17	02	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
2	02	17	03	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2	02	17	04	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2	02	17	05	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
2	02	17	06	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK)
2	02	17	07	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya hutan
2	02	17	08	Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Sumber Mata Air
2	02	18		**Program pemanfaatan kawasan hntan indnstri**
2	02	18	01	Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah
2	02	18	02	Dst .....

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
2	02	19		**Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan**
2	02	19	01	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2	02	19	02	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2	02	19	03	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2	02	19	04	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
2	02	19	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	02	19	06	Pembinaan Tata Peredaran Hasil Hutan (TPHH)
2	02	20		**Program perencanaan dan pengembangan hutan**
2	02	20	01	Pengembangan hutan masyarakat adat
2	02	20	02	Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
2	02	20	03	**Dst** .....
2	02	21		**Program Dst** .....
2	03			**RNERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
2	03	15		**Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan**
2	03	15	01	Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2	03	15	02	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2	03	15	03	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
2	03	15	04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
2	03	15	05	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
2	03	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	03	15	07	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ESDM
2	03	15	08	Profil ESDM Dalam Angka
2	03	15	09	penyusunan sistem informasi pertambangan
2	03	15	10	pemetaan rawan gerakan tanah
2	03	15	11	pemetaan potensi air tanah
2	03	15	12	pembinaan pengelolaan potensi tambang dan tata cara penambangan
2	03	16		**Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan**
2	03	16	01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
2	03	16	02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
2	03	16	03	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
2	03	16	04	Pembinaan teknis kegiatan usaha pertambangan rakyat
2	03	16	05	pengawasan dan penertiban kegiatan usaha pertambangan
2	03	16	06	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
2	03	16	07	Pemantauan reklamasi daerah pertambangan
2	03	16	08	pengembangan kawasan geopark
2	03	16	09	pengawasan dan penertiban kegiatan usaha pertambangan
2	03	17		**Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan**
2	03	17	01	Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
2	03	17	02	Pengembangan jaringan listrik di dusun dan daerah terpencil
2	03	17	03	Pengembangan energi baru terbarukan
2	03	17	04	Pengembangan energi perdesaan
2	03	17	05	Evaluasi hemat energi
2	03	17	06	Perencanaan dan pendataan bidang energi
2	03	17	07	Pemeliharaan dan operasional perangkat PLTS, PLTMH
2	04			**PARIWISATA**
2	04	15		**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**
2	04	15	01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
2	04	15	02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
2	04	15	03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
2	04	15	04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2	04	15	05	Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
2	04	15	06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
2	04	15	07	Pengembangan Statistik Kepariwisataan
2	04	15	08	Pelatihan pemandu wisata terpadu
2	04	15	09	Promosi wisata melalui media cetak, radio dan televisi
2	04	15	10	Roadshow, talkshow budaya dan pariwisata Pacitan di dalam negeri
2	04	15	11	Seleksi dan Pembinaan Kethuk Kenang/Raka Raid dan Duta Wisata Daerah
2	04	**16**		**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**
2	04	16	01	Pengembangan objek pariwisata unggulan
2	04	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
2	04	16	03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
2	04	16	04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
2	04	16	05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
2	04	16	06	Pengembangan daerah tujuan wisata
2	04	16	07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
2	04	16	08	Pengembangan sarana dan prasarana wisata Pantai Klayar
2	04	16	09	Revitalisasi kawasan wisata pemandian air hangat
2	04	16	10	Pengembangan sarana dan prasarana wisata Goa Gong
2	04	16	11	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata (BK)
2	04	16	12	Penyusunan dokumen naskah akademis RIPDA
2	04	16	13	Pembahasan PERDA RIPDA
2	04	16	14	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)
2	04	17		Program Pengembangan Kemitraan
2	04	17	01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database
2	04	17	02	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
2	04	17	03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
2	04	17	04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
2	04	17	05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
2	04	17	06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
2	04	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
2	04	17	08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
2	04	17	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	04	17	10	Dst .....
2	05			**KELAUTAN DAN PERIKANAN**
2	05	15		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2	05	15	01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
2	05	15	02	Penyusunan profil desa pesisir Kabupaten Pacitan
2	05	15	03	Penyusunan study kelayakan pengembangan PPI Tawang
2	05	15	04	Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
2	05	15	05	Pendampingan program nasional minapolitan dan PNPM M-KP
2	05	15	09	penetapan dan sosialisasi perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
2	05	15	10	penguatan kelembagaan KUB perikanan tangkap
2	05	15	11	penguatan kelemtiagaan KUB perikanan tangkap
2	05	15	13	pendampinagan program sertifikasi hak atas tanah nelayan
2	05	15	14	Pendampingan Bantuan Kapal Katamaran dan Kapal 10-20 GT

Paraf Pertama
Sekda
Asisten
Kabag Hukum

Paraf Koordinasi
SKPD/ Bagian Perekonomian
SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
2	05	15	15	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi bidang kelautan dan perikanan
2	05	15	16	Penyusunan DED pengembangan TPI
2	05	15	17	Pendapingan program nasional minapolitan dan PNPM M K-P
2	05	15	18	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
2	05	16		**Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya lautan**
2	05	16	01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
2	05	16	02	Pengawasan Keamanan Laut Terpadu
2	05	16	07	Pengembangan kawasan konsewrvasi penyu laut (DAK)
2	05	16	09	rehabilitasi mangrove ,terumbu karang dan lamun
2	05	16	10	pengembangan sarana dan prasarana pengawasan (DAK)
2	05	16	11	pengembangan sarana dan prasarana konservasi (DAK)
2	05	16	12	Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan POKMASWAS (DAK)
2	05	16	13	Rehabilitasi ekosistim magrove dan terumbu karang
2	05	16	14	Pengembangan kawasan konsevasi perairan
2	**05**	**17**		**Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya lant**
2	05	17	01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
2	05	17	02	Dst .....
2	05	18		**Program peningkatan mitigasi bencana alam lant dan prakiraan Iklim lant**
2	05	18	01	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2	05	18	02	Dst .....
2	**06**	**19**		**Program peningkatan kegiatan budaya kelantan dan wawasan maritim kepada masyarakat**
2	05	19	01	Penyuluhan budaya kelautan
2	05	19	02	Dst .....
2	**05**	20		**Program pengembangan budidaya perikanan**
2	05	20	01	Pengembangan bibit ikan unggul
2	05	20	02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2	05	20	03	Pembinaan dan pengembangan perikanan
2	05	20	04	Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan (BK)
2	05	20	11	Pembangunan sarana dan prasarana budldaya ikan (DAK)
2	05	20	12	Pengembangan budldaya ikan lele
2	05	20	13	pengembangan prasarana dudidaya ikan
2	05	20	15	Optimalisasi sarana dan prasarana tambak (DAK)
2	05	20	16	Pendampingan PUMP budidaya perikanan
2	05	20	18	optimalisasi budidaya perikanan (DAK)
2	05	20	20	Pembinaan dan pengembangan perikanan
2	05	20	21	Optimalisasi unit pembenihan rakyat
2	05	20	22	Anti Proverty Program (APP) bidang perikanan
2	05	20	23	Sertivikasi Hak Atas Tanah Pembudidayaan Ikan
2	05	20	26	Optimalisasi Bantuan Perikanan Budidaya
2	05	21		**Program pengembangan perikanan tangkap**
2	05	21	01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2	05	21	02	Pembangunan tempat pelelangan ikan
2	05	21	03	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
2	05	21	04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
2	05	21	05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
2	05	21	06	Peningkatan sarana dan prasarana pendaratan ikan (DAK)
2	05	21	07	Pengembangan sarana perikanan tangkap (DAK)
2	05	21	08	Restocking ikan dan pembinaan kelompok di perairan umum

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Perrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
2	05	21	09	Penguatan kelembagaan KUB penerima bantuan kapal Inka Mina
2	05	21	10	Fasilitasi minapolitan perikanan tangkap
2	05	21	11	Pengadaan sarana perikanan tangkap (BK)
2	05	21	12	Pembangunan fasilitas tempat pendaratan ikan (BK)
2	05	21	13	Pengembangan alat penangkapan ikan
2	05	21	14	Registrasi kapal perikanan
2	05	21	15	Penataan lingkungan desa pesisir
2	05	21	25	Penyusunan Study Amdal Pengembangan PPI Tawang
2	05	21	27	Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
2	05	**22**		**Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan**
2	05	22	01	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Penyuluh (DAK)
2	05	22	02	Legalisasi usaha perikanan
2	05	22	03	Magang pembudidayaan ikan dan nelayan, pengolah/pemasaran
2	05	22	04	Peningkatan sarana / prasarana penyuluh dan magang penyuluh
2	05	22	05	Optimalisasi kelembagaan pelaku usaha
2	05	22	05	Pelatihan pembudidaya ikan dan nelayan
2	05	22	27	pelatihan pengelolaan ikan
2	05	22	28	bimbingan telmis pelatni utama perikman
2	05	**23**		**Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**
2	05	23	01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2	05	23	02	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan
2	05	23	03	Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)
2	05	23	04	Promosi Produk Unggulan Perikanan
2	05	23	05	Rehab los pasar ikan
2	05	23	06	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan (BK)
2	05	23	07	Peningkatan kemampuan manajemen usaha perikanan
2	05	23	08	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan (BK)
2	05	23	11	Pengawasan mutu produk perikanan
2	05	23	12	pengendalian mutu hasil perikanan
2	05	23	13	peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan (DAK)
2	05	23	14	Bintek peningkatan mutu hasil perikanan
2	05	23	15	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana perikanan
2	**05**	**24**		**Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar**
2	05	24	01	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2	05	24	02	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar
2	05	24	03	Anti Pruverty Program (APP) Bidang Perikanan
2	05	24	10	optimalisasi sarana dan prasana tambak (DAK)
2	05	24	11	budidaya ikan di keramba (DAK)
2	05	24	12	Pengembangan budidaya mina padi
2	05	24	13	Pengembangan budidaya udang intensif
2	05	**25**		**Program Dst .....**
2	**06**			**PERDAGANGAN**
2	**06**	**15**		**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**
2	06	15	01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2	06	15	02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
2	06	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2	06	15	04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2	06	15	05	Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP
2	06	15	07	pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Perencanaan

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
2	06	16		**Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional**
2	06	16	01	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
2	06	16	02	Penyeharluasan informasi data base kuota setian jenis barang dan jasa
2	06	16	03	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
2	06	16	04	Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
2	06	16	05	Koordinasi pengelolaan isn-isu perdagangan intemasional
2	06	16	06	Dst .....
2	06	17		**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**
2	06	17	01	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
2	06	17	02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
2	06	17	03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
2	06	17	04	Pengembangan data base informasi potensi unggulan
2	06	17	05	Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan intemasional
2	06	17	06	Kerjasama dengan lembaga intenasional dalam rangka pengembangan produk
2	06	17	07	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
2	06	17	08	Membangun jejaring dengan eksportir
2	06	17	09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha
2	06	17	10	Pengembangan Kluster produk ekspor
2	06	17	11	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
2	06	17	12	Pembangunan promosi perdagangan intemasional
2	06	17	13	Dst .....
2	06	18		**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**
2	06	18	01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
2	06	18	02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
2	06	18	03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
2	06	18	04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
2	06	18	05	Pengembangan pasar lelang daerah
2	06	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2	06	18	07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
2	06	18	08	Operasi pasar khusus
2	06	18	09	Promosi dan pemasaran di dalam daerah
2	06	18	10	Monitoring dan pemantauan sembako, barang penting lainnya
2	06	18	11	Pasar murah
2	06	18	12	Revitalisasi Pasar Daerah (DAK)
2	06	18	13	Promosi informasi dan misi dagang
2	06	18	14	Updating data base perdagangan
2	06	19		**Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**
2	06	19	01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
2	06	19	02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
2	06	19	03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
2	06	19	04	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
2	06	19	05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan,
2	06	19	06	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan
2	06	19	07	Dst .....
2	06	20		**Program Dst .....**
2	07			**PERINDUSTRIAN**
2	07	15		**Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Prodnksi**
2	07	15	01	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
2	07	15	02	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
2	07	15	03	Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi
2	07	15	04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas
2	07	15	05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
2	07	15	06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
2	07	15	07	Dst .....
2	07	16		Program **Pengembangan** Industri **Kecil** dan **Menengah**
2	07	16	01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
2	07	16	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2	07	16	03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
2	07	16	04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2	07	16	05	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
2	07	16	06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
2	07	16	07	Pendataan Industri Kecil Menengah
2	07	16	08	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati/tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
2	07	16	10	Bimbingan teknis dan penerpan good manufacture practice (GMP) bagi industri rokok
2	07	16	11	Peningkatan ketrampilan masyarakat / industri kecil menengah (IKM) di lingkungan industri rokok
2	07	16	12	Pealatihan dan fasilitasi kewirausahaan
2	07	16	13	Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi dengan industri hasil tembakau
2	07	16	14	Pelatihan **Alih** Profesi dan Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil Menengah di Sekitar Industri Rokok
2	07	16	16	Monitoring Industri Kecil Menengah
2	07	**17**		**Program Peningkatan Kemampnan Teknologi** Indnstri
2	07	17	01	Pembinaan kemampuan teknologi industri
2	07	17	02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2	07	17	03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
2	07	17	04	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
2	07	17	05	Dst .....
2	07	18		**Program Penataan Struktnr Indnstri**
2	07	18	01	Kebijakan keterkaitan indusrtri hulu-hilir
2	07	18	02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
2	07	18	03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
2	07	18	04	Dst .....
2	07	**19**		**Program pengembangan sentra-sentra indnstri potensial**
2	07	19	01	Pembangunan akses tranportasi sentra-sentra industri potensial
2	07	19	02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
2	07	19	03	Peningkatan Produk Batu Mulia Menuju Terbentuknya Cluster (Dampingan **A**PBN)
2	07	19	04	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau danatau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui Peningkatan SDM bagi Pelaku Industri Kecil Menengah

Paraf Koordinasi
Sekda
Asisten
Kabag Hukum

Paraf Koordinasi
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
SKPD/ Bagian Terkait
1. _____
2. _____
3. _____

KODE				URAIAN
2	07	19	05	Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi bagi IKM
2	07	19	06	Pengembangan pusat industri kecil batu mulia
2	07	19	07	Pengembangan industri gula kelapa organik
2	07	19	09	Pengembangan industri kreatif
2	07	19	10	Pengembangan kompetensi inti industri daerah
2	07	19	11	Pengembangan produk unggulan
2	**07**	**20**		**Program Dst .....**
2	**08**			**TRANSMIGRASI**
2	**08**	**15**		**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**
2	08	15	01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi perbatasan
2	08	15	02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
2	08	15	03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
2	08	15	04	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi
2	08	15	05	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
2	08	15	06	Pendidikan dan pelatihan transmigrasi regional
2	**08**	**16**		**Program Transmigrasi lokal**
2	08	16	01	Penyuluhan transmigrasi lokal
2	08	16	02	Pelatihan transmigrasi lokal
2	08	16	03	Dst .....
2	**08**	**17**		**Program Transmigrasi regional**
2	08	17	01	Penyuluhan transmigrasi regional
2	08	17	02	Pelatihan transmigrasi regional
2	08	17	03	Dst .....
2	**08**	**18**		**Program Dst .....**

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Lampiran III : **PERATURAN BUPATI PACITAN**
Nomor : 19 Tahun 2016
Tanggal : 30 - 5 - 2016

KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KODB					URAIAN
4					**PENDAPATAN DAERAH**
4	1	1			**Pendapatan Asli Daerah**
4	1	1	01		**Hasil Pajak Daerah**
4	1	1	01		**Pajak Hotel**
4	1	1	01	01	Hotel Bintang Lima Berlian
4	1	1	01	02	Hotel Bintang Lima
4	1	1	01	03	Hotel Bintang Empat
4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga
4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua
4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu
4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga
4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua
4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu
4	1	1	01	10	Motel
4	1	1	01	11	Cottage
4	1	1	01	12	Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Rumah Kos
4	1	1	01	13	Wisma Pariwisata
4	1	1	01	14	Gubuk Pariwisata
4	1	1	01	15	Dst.....
4	1	1	02		**Pajak Restoran**
4	1	1	02	01	Restoran
4	1	1	02	02	Rumah makan
4	1	1	02	03	Cafe
4	1	1	02	04	Kantin
4	1	1	02	05	Katering
4	1	1	02	06	Warung
4	1	1	02	07	Bar
4	1	1	02	08	Jasa Boga
4	1	1	02	09	Dst.....
4	1	1	03		**Pajak Hiburan**
4	1	1	03	01	Tontonan Film/bioskop
4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	1	03	03	Kontes Kecantikan
4	1	1	03	04	Kontes Binaraga
4	1	1	03	05	Pameran
4	1	1	03	06	Diskotik
4	1	1	03	07	Karaoke
4	1	1	03	08	Klub Malam
4	1	1	03	09	Sirkus / Akrobat / Sulap
4	1	1	03	10	Permainan Bilyar
4	1	1	03	11	Permainan Golf
4	1	1	03	12	Permainan Bowling
4	1	1	03	13	Pacuan Kuda
4	1	1	03	14	Balap Kendaraan Bermotor
4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan
4	1	1	03	16	Panti pijat / Refleksi
4	1	1	03	17	Mandi Uap / Spa
4	1	1	03	18	Pusat Kegugaran
4	1	1	03	19	Pertandingan Olah raga
4	1	1	03	20	Dst.....

Sekda
Asisten
Kabag Hukum
SKPD/ Bagian Perkait
SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODB					URAIAN
4	1	1	04		Pajak Reklame
4	1	1	04	01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron
4	1	1	04	02	Reklame Kain
4	1	1	04	03	Reklame Melekat/Stiker
4	1	1	04	04	Reklame Selebaran
4	1	1	04	05	Reklame Berjalan
4	1	1	04	06	Reklame Udara
4	1	1	04	07	Reklame Apung
4	1	1	04	08	Reklame Suara
4	1	1	04	09	Reklame Film/Slide
4	1	1	04	10	Reklame Peragaan
4	1	1	04	11	Dst.....
4	1	1	05		Pajak Penerangan Jalan
4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PLN
4	1	1	05	02	Dst .....
4	1	1	07		Pajak Parkir
4	1	1	07	01	Pajak Parkir
4	1	1	08		Pajak Air Tanah
4	1	1	08	01	Pajak Air Tanah
4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	1	11	01	Asbes
4	1	1	11	02	Batu Tulis
4	1	1	11	03	Batu Setengah Permata
4	1	1	11	04	Batu Kapur
4	1	1	11	05	Batu Apung
4	1	1	11	06	Pajak Mineral Bukan Logam
4	1	1	11	07	Pajak Batuan (non sirtu)
4	1	1	11	08	Pajak Batuan (sirtu)
4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4	1	1	12	01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4	1	1	13		Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4	1	1	13	01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4	1	2			HASIL RETRIBUSI DAERAH
4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum
4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	2	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
4	1	2	01	03	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4	1	2	01	04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	2	01	05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	2	01	06	Retribusi pelayanan pasar
4	1	2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	2	01	08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	2	01	09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	2	01	10	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	2	01	11	Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus
4	1	2	01	12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
4	1	2	01	13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomuniksi
4	1	2	01	14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	2	01	15	Dst.....
4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha
4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE					URAIAN
4	1	2	02	02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	2	02	04	Retribusi Terminal
4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	2	02	06	Retribusi Tempat Penginapan/Villa/Pesanggrahan
4	1	2	02	08	Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	2	02	09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4	1	2	02	10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	2	02	11	Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	2	02	13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	2	02	14	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan & IB
4	1	2	02	15	Retribusi pengelolaan Sarang Burung Walet dan yang sejenisnya
4	1	2	02	16	Retribusi Pengelolaan Pengambilan Rumput Laut
4	1	2	03		**Retribusi Perizinan Tertentu**
4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	2	03	02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	2	03	03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4	1	2	03	04	Retribusi Izin Trayek
4	1	2	03	05	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	3			**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**
4	1	3	01		**Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD**
4	1	3	01	01	Bank Jatim
4	1	3	01	02	Bank Perkreditan Rakyat
4	1	3	01	03	Perusahaan Daerah Air Minum
4	1	3	01	04	Perusahaan Daerah Batu Alam
4	1	3	01	05	UBIBAM
4	1	3	02		**Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN**
4	1	3	02	01	BUMN .....
4	1	3	02	02	Dst .....
4	1	3	03		**Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Swasta**
4	1	3	03	01	Perusahaan Patungan
4	1	4			**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**
4	1	4	01		**Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak di Pisahkan**
4	1	4	01	01	Pelepasan Hak Atas Tanah
4	1	4	01	02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
4	1	4	01	03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai
4	1	4	01	04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4	1	4	01	05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4	1	4	01	07	Penjualan Drum Bekas
4	1	4	01	08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4	1	4	01	09	Penjualan Lampu Hias Bekas
4	1	4	01	10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
4	1	4	01	11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4	1	4	01	12	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi
4	1	4	01	13	Penjualan Hasil Pertanian
4	1	4	01	14	Penjualan Hasil Kehutanan
4	1	4	01	15	Penjualan Hasil Perkebunan
4	1	4	01	16	Penjualan Hasil Peternakan
4	1	4	01	17	Penjualan Hasil Perikanan
4	1	4	01	18	Penjualan Hasil Sitaan
4	1	4	01	19	dst .....
4	1	4	02		Penerimaan Jasa Giro
4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah
4	1	4	02	02	Jasa Giro Pemegang Kas
4	1	4	02	03	Jasa Giro Dana Cadangan

Sekda
Asisten
Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE					URAIAN
4	1	4	03		Pendapatan **Bunga** Deposito
4	1	4	03	01	Rekening Deposito pada BPD
4	1	4	03	02	Rekening Deposito pada BRI
4	1	4	03	03	Rekening Deposito pada BNI
4	1	4	03	04	Pendapatan Bunga Piutang
4	1	4	03	05	Rekening Deposito pada Bank Mandiri
4	1	4	04		**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**
4	1	4	04	01	Kerugian Uang
4	1	4	04	02	Kerugian Barang Daerah
4	1	4	04	03	Dst .....
4	1	4	05		**Komisi,Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah**
4	1	4	05	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah
4	1	4	05	02	Penerimaan Potongan dari .....
4	1	4	05	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari .....
4	1	4	05	04	Dst .....
4	1	4	06		Pendapatan Denda **Atas Keterlambatan** Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	06	01	Bidang Pendidikan
4	1	4	06	02	Bidang Kesehatan
4	1	4	06	03	Bidang Pekerjaan Umum
4	1	4	06	04	Bidang Perumahan Rakyat
4	1	4	06	05	Bidang Penataan Ruang
4	1	4	06	06	Bidang Pereneanaan Pembangunan
4	1	4	06	07	Bidang Perhubungan
4	1	4	06	09	Bidang Pertanahan
4	1	4	06	10	Dst .....
4	1	4	07		Pendapatan Denda Pajak 1)
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	4	07	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	4	07	03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	4	07	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	4	07	05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	4	07	07	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	4	07	08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4	1	4	07	09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	4	07	11	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	4	07	12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4	1	4	07	13	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4	1	4	08		Pendapatan Denda Retribusi 1)
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	4	08	04	Dst .....
4	1	4	09		Pendapatan **Hasil Eksekusi atas Jaminan**
4	1	4	09	01	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	09	02	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4	1	4	09	03	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4	1	4	09	04	Dst .....
4	1	4	10		Pendapatan dari Pengembalian
4	1	4	10	01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	4	10	02	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4	1	4	10	03	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
4	1	4	10	04	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas
4	1	4	10	05	Pendapatan dari Pengembalian dari uang muka
4	1	4	10	06	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran belanja non gaji dan tunjangan
4	1	4	11		**Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum**

Asisten
Kabag
Hukum

SKPD Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

KODE					URAIAN
4	1	4	11	01	Fasilitas Sosial
4	1	4	11	02	Fasilitas Umum
4	1	4	11	03	Dst .....
4	1	4	12		Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4	1	4	12	01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4	1	4	12	02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
4	1	4	12	03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
4	1	4	12	04	Dst .....
4	1	4	13		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4	1	4	13	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Gol.III
4	1	4	13	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4	1	4	13	03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4	1	4	14		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	14	01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
4	1	4	15		Pendapatan dari BLUD
4	1	4	15	01	Pendapatan dari BLUD
4	1	4	16		Pendapatan Lain-Lain
4	1	4	16	01	Pendapatan Lain-Lain
4	1	4	16	02	Pendapatan Akibat Kerjasama
4	1	4	17		Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
4	1	4	17	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan
4	1	4	17	02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari
4	1	4	17	03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung
4	1	4	17	04	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo
4	1	4	17	05	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari
4	1	4	17	06	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo
4	1	4	17	07	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung
4	1	4	17	08	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari
4	1	4	17	09	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku
4	1	4	17	10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi
4	1	4	17	11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo
4	1	4	17	12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak
4	1	4	17	13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo
4	1	4	17	14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto
4	1	4	17	15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan
4	1	4	17	16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan
4	1	4	17	17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro
4	1	4	17	18	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo
4	1	4	17	19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo
4	1	4	17	20	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo
4	1	4	17	21	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan
4	1	4	17	22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru
4	1	4	17	23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar
4	1	4	17	24	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	1			Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan / PBB
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan / BPHTB
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4	2	1	01	04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

Sekda

Asisten

Biro/Bag Hukum

SKPD bagian terkait
1. _____
2. _____
3. _____

KODE					URAIAN
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari luran Tetap (Land-rent)
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti)
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4	2	1	02	11	Dst .....
4	2	2			Dana Alokasi Umum
4	2	2	01		Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum
4	2	3			Dana Alokasi Khusus (DAK)
4	2	3	01		Dana Alokasi Khusus Fisik
4	2	3	01	01	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler
4	2	3	01	02	Dana Alokasi Khusus IPD
4	2	3	02		Dana Alokasi Khusus Non Fisik
4	2	3	02	02	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)
4	2	3	02	03	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (TAMSILPNSD)
4	2	3	02	05	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PUD (BOP PAUD)
4	2	3	02	06	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
4	3				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4	3	1			Pendapatan Hibah
4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	01	01	Pemerintah
4	3	1	01	02	Dst. .....
4	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	02	01	Pemerintah Daerah.....
4	3	1	02	02	Dst .....
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	1	03	01	PT.DWI KARYA BANGKIT SEJAHTERA
4	3	1	03	02	Dst .....
4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4	3	1	04	01	Kelompok Masyarakat / Perorangan
4	3	1	04	02	Dst .....
4	3	1	05		Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4	3	1	05	02	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4	3	1	05	03	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4	3	1	05	04	Dst .....
4	3	2			Dana Darurat
4	3	2	01		Penanggulangan Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam
4	3	2	01	01	Korban/ Kerusakan akibat bencana alam
4	3	2	01	02	Dst .....
4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4	3	3	01	03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	3	3	01	05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	3	3	01	07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4	3	3	01	08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok

KODE					URAIAN
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4	2	1	02	11	Dst .....
4	2	2			**Dana Alokasi Umum**
4	2	2	01		**Dana Alokasi Umum (DAU)**
4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum
4	2	3			**Dana Alokasi Khusus (DAK)**
4	2	3	01		**Dana Alokasi Khusus Fisik**
4	2	3	02	01	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler
4	2	3	02	02	Dana Alokasi Khusus IPD
4	2	3	02		**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**
4	2	3	02	02	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)
4	2	3	02	03	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (TAMSILPNSD)
4	2	3	02	05	Dana Bantuan Opersional Penyelenggaraan PUD (BOP PAUD)
4	2	3	02	06	Dana Bantuan Opersional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Opersional Keluarga Berencana (BOKB)
4	3				**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**
4	3	1			**Pendapatan Hibah**
4	3	1	01		**Pendapatan Hibah dari Pemerintah**
4	3	1	01	01	Pemerintah
4	3	1	01	02	Dst. .....
4	3	1	02		**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya**
4	3	1	02	01	Pemerintah Daerah.....
4	3	1	02	02	Dst .....
4	3	1	03		**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri**
4	3	1	03	01	PT.DWI KARYA BANGKIT SEJAHTERA
4	3	1	03	02	Dst .....
4	3	1	04		**Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan**
4	3	1	04	01	Kelompok Masyarakat / Perorangan
4	3	1	04	02	Dst .....
4	3	1	05		**Pendapatan Hibah dari Luar Negeri**
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4	3	1	05	02	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4	3	1	05	03	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4	3	1	05	04	Dst .....
4	3	2			**Dana Darurat**
4	3	2	01		**Penanggulangan Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam**
4	3	2	01	01	Korban/ Kerusakan akibat bencana alam
4	3	2	01	02	Dst .....
4	3	3			**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**
4	3	3	01		**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**
4	3	3	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4	3	3	01	03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	3	3	01	05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	3	3	01	07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4	3	3	01	08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok

Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD/ Bagian Pemrakarsa
SKPD/ Bagian Terkait: 1. _____ 2. _____ 3. _____

KODE					URAIAH
4	3	3	02		**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)**
4	3	3	02	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ....
4	3	3	02	02	Dst .....
4	3	3	03		**Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)**
4	3	3	03	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten ....
4	3	3	03	02	Dst .....
4	3	3	04		**Dana Bagi Hasil dari Kota 3)**
4	3	3	04	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .....
4	3	3	04	02	Dst .....
4	3	4			**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**
4	3	4	01		**Dana Penyesuaian**
4	3	4	01	02	Dana Penyesuaian
4	3	4	02		**Dana Otonomi Khusus**
4	3	4	02	01	Dana Otonomi Khusus ....
4	3	4	02	02	Dana Desa
4	3	5			**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**
4	3	5	01		**Bantuan Keuangan dari Provinsi**
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi ....
4	3	5	01	02	Dst .....
4	3	5	02		**Bantuan Keuangan dari Kabupaten**
4	3	5	02	01	Bantuan Keuangan dari Kabupaten ....
4	3	5	02	02	Dst .....
4	3	5	03		**Bantaan Keuangan dari Kota**
4	3	5	03	01	Bantuan Keuangan dari Kota ....
4	3	5	03	02	Dst .....

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Lampiran IV : **PERATURAN BUPATI PACITAN**
Nomor : 19 Tahun 2016
Tanggal : 30 - 5 - 2016

KODE REKENING BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Kode Rekening					Nama Rekening
5	1	1	01		**Gaji** dan Tunjangan
5	1	1	01	01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional
5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional umum
5	1	1	01	06	Tunjangan Beras
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji
5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan
5	1	1	01	10	Uang Paket
5	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah
5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi
5	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran
5	1	1	01	14	Tunjangan Badan kehormatan
5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan
5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat / Tewas
5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	01	19	Belanja Penunujang operasional pimpinan DPRD
5	1	1	01	20	Tunjangan Profesi Guru
5	1	1	01	21	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja
5	1	1	02		**Tambahan Penghasilan PNS**
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
5	1	1	02	02	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5	1	1	02	03	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5	1	1	02	04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5	1	1	02	05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5	1	1	02	07	Tambahan Penghasilan Guru
5	1	1	03		**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH**
5	1	1	03	01	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang Operaional KDH/WKDH
5	1	1	04		**Biaya Pemungutan Pajak Daerah**
5	1	1	04	01	Biaya Pemungutan PBB
5	1	1	05		**Insentif Pemungutan Pajak Daerah**
5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	06		**Insentip Pemungutan Retribusi Daerah**
5	1	1	06	01	Insentip Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	2			**Belanja Bunga**

Sekda
Asisten
Kabag Hukum
SKPD Bagian Terkait
1.
2.
3.

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	1	2	01		**Bunga Utang Pinjaman**
5	1	2	01	01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5	1	2	01	02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	2	01	03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	2	01	04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	2	02		**Bunga Utang Obligasi**
5	1	2	02	01	Bunga Utang Obligasi
5	1	3			**BELANJA SUBSIDI**
5	1	3	01		**Belanja Subsidi kepada Perusahaan / Lembaga**
5	1	3	01	01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan.....
5	1	3	01	02	Belanja Subsidi kepada Lembaga ....
5	1	3	01	03	Dst.....
5	1	4			**BELANJA HIBAH**
5	1	4	01		**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**
5	1	4	01	01	Pemerintah Pusat
5	1	4	02		**Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**
5	1	4	02	01	Pemerintahan Daerah
5	1	4	02	02	Dst .....
5	1	4	03		**Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa**
5	1	4	03	01	Pemerintahan Desa .....
5	1	4	03	02	Dst .....
5	1	4	04		**Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah / BUMD /BUMN**
5	1	4	04	01	Perusahaan Daerah /BUMD / BUMN .....
5	1	4	04	02	Dst .....
5	1	4	05		**Belanja Hibah Kepada Badan / lembaga / Organisasi Swasta**
5	1	4	05	01	Badan / Lembaga / Orgmisasi swasta
5	1	4	06		**Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan**
5	1	4	06	01	Kelompok Masyarakat/Perorangan
5	1	4	06	02	Dst .....
5	1	4	07		**Belanja Hibah Dana BOS**
5	1	4	07	01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta
5	1	4	07	02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta
5	1	4	07	03	Dst .....
5	1	5			**BELANJA BANTUAN SOSIAL**
5	1	5	01		**Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan**
5	1	5	01	01	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
5	1	5	02		**Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat**
5	1	5	02	01	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat .....
5	1	5	03		**Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat**
5	1	5	03	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat .....
5	1	5	03	02	Dst.....

Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	1	5	05		**Dst.....**
5	1	6			**BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI /KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA**
5	1	6	01		**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi**
5	1	6	01	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...
5	1	6	01	02	Dst .....
5	1	6	02		**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota**
5	1	6	02	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...
5	1	6	02	02	Dst .....
5	1	6	03		**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa**
5	1	6	03	01	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa
5	1	6	03	02	Dst .....
5	1	6	04		**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota**
5	1	6	04	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...
5	1	6	04	02	Dst .....
5	1	6	05		**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa**
5	1	6	05	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...
5	1	6	05	02	Bst .....
5	1	6	06		**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Propinsi**
5	1	6	06	01	Bealanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan
5	1	7			**BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK**
5	1	7	01		**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi**
5	1	7	01	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi ...
5	1	7	01	02	Dst .....
5	1	7	02		**Belanja Bantuan Kenangan Kepada Kabupaten/Kota**
5	1	7	02	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota ...
5	1	7	02	02	Dst .....
5	1	7	03		**Belanja Bantuan Kenangan Kepada Desa**
5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ...
5	1	7	04		**Belanja Bantuan Kenangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya**
5	1	7	04	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi ...
5	1	7	04	02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota ...
5	1	7	04	03	Belanja Dantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
5	1	7	04	04	Dst .....
5	1	7	05		**Belanja Bantuan Kepada Partai Politik**
5	1	7	05	01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5	1	8			**BELANJA TIDAK TERDUGA**
5	1	8	01		**Belanja Tidak Terduga**
5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga
5	2				**BELANJA LANGSUNG**

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	1			**BELANJA PEGAWAI**
5	2	1	01		**Honorarium PNS**
5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5	2	1	01	04	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
5	2	1	01	05	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
5	2	1	02		**Honorarium Non PNS**
5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5	2	1	02	03	Upah Tenaga Harian
5	2	1	02	04	Upah Tenaga Borongan
5	2	1	03		**Uang Lembur**
5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS
5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS
5	2	1	04		**Jasa Pemungutan**
5	2	1	04	02	Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB
5	2	1	05		**Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**
5	2	1	05	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5	2	1	05	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5	2	1	05	03	Uang untuk diberikan kepada Siswa atau Pelajar
5	2	1	06		**Honorarium Pengelolaan Dana BLUD**
5	2	1	06	01	Honorarium Pengelolaan Dana BLUB
5	2	2			**BELANJA BARANG DAN JASA**
5	2	2	01		**Belanja Bahan Pakai Habis Kantor**
5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor
5	2	2	01	02	Belanja dokumen / administrasi tender
5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)
5	2	2	01	04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5	2	2	01	06	Belanja bahan bakar minyak / gas
5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas
5	2	2	01	09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
5	2	2	01	10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
5	2	2	01	11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5	2	2	01	12	Belanja Barang Pasca MOW/MOP
5	2	2	02		**Belanja Bahan / Material**
5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan
5	2	2	02	02	Belanja bahan / bibit tanaman
5	2	2	02	03	Belanja Bibit Ternak
5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan
5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia
5	2	2	02	06	Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
5	2	2	02	07	Belanja pakan ternak
5	2	2	02	08	Belanja bahan pupuk
5	2	2	02	09	Belanja Bibit Ikan dan Pakan
5	2	2	02	10	Bahan Baku Perikanan
5	2	2	02	11	Belanja Bahan Makanan

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	2	02	12	Belanja bahan baku industri
5	2	2	02	13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
5	2	2	02	14	Belanja Peralatan Industri
5	2	2	02	15	Belanja Induk Ikan
5	2	2	02	16	Belanja Bingkai/Figura Lambang /Logo/Lukisan/Hiasan Dinding
5	2	2	03		**Belanja Jasa Kantor**
5	2	2	03	01	Belanja telepon
5	2	2	03	02	Belanja Air
5	2	2	03	03	Belanja Listrik
5	2	2	03	04	Belanja Jasa Pemungutan Lelang/Pemenang Leiang
5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah
5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimil/internet
5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman
5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi
5	2	2	03	09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	2	2	03	10	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5	2	2	03	11	Belanja Jasa administrasi penyelesaian perkara
5	2	2	03	12	Belanja Sofware
5	2	2	03	13	Belanja Pemasangan iklan
5	2	2	03	14	Belanja jasa layanan kesehatan
5	2	2	03	15	Belanja Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah
5	2	2	03	16	Belanja Jasa Media
5	2	2	03	17	Belanja Akomodasi
5	2	2	03	18	Belanja Jasa Loundry
5	2	2	03	19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis
5	2	2	03	21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
5	2	2	03	22	Belanja Jasa Claning Service
5	2	2	03	23	Belanja Jasa Teknis
5	2	2	03	24	Belanja Jasa Pihak Ketiga
5	2	2	03	25	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
5	2	2	03	26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat
5	2	2	03	27	Uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
5	2	2	03	28	Belanja Jasa Profesi
5	2	2	03	29	Jasa Premi Pendamping Operator dan PKH
5	2	2	03	30	Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB
5	2	2	04		**Belanja Premi Asuransi**
5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5	2	2	04	03	Dst .....
5	2	2	05		**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**
5	2	2	05	01	Belanja jasa service
5	2	2	05	02	Belanja penggantian suku cadang
5	2	2	05	03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
5	2	2	05	04	Belanja jasa kir
5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5	2	2	05	06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5	2	2	05	07	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional
5	2	2	06		**Belanja Cetak dan Penggandaan**
5	2	2	06	01	Belanja Cetak
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan
5	2	2	06	03	Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah
5	2	2	07		**Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir**
5	2	2	07	01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat

Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait: 1. 2. 3.
Kabag Hukum	

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	2	07	03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
5	2	2	07	04	Belanja Sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5	2	2	07	05	Belanja sewa tanah
5	2	2	07	06	Dst .....
5	2	2	08		**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**
5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5	2	2	08	02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5	2	2	08	03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5	2	2	09		**Belanja Sewa Alat Berat**
5	2	2	09	01	Belanja sewa Eskavator
5	2	2	09	02	Belanja sewa Buldoser
5	2	2	10		**Belanja Sewa Perlengkapan nan Peralatan Kantor**
5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi
5	2	2	10	02	Belanja Sewa Komputer dan Printer
5	2	2	10	03	Belanja sewa proyektor
5	2	2	10	04	Belanja sewa generator
5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda
5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5	2	2	10	07	Belanja sewa sound sistem
5	2	2	10	08	Belanja sewa panggung
5	2	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi dan Perelengkapannya
5	2	2	10	10	Belanja Sewa Genset
5	2	2	10	11	Belanja Sewa Alat Ukur
5	2	2	10	12	Belanja Sewa Alat Pemotong
5	2	2	10	13	Sewa Mesin Pendingin Ruangan (AC)
5	2	2	11		**Belanja Makanan dan Minnman**
5	2	2	11	01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman rapat
5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien
5	2	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial
5	2	2	11	06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta
5	2	2	11	07	Belanja Makan Minum kegiatan
5	2	2	12		**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**
5	2	2	12	01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	2	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	2	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	2	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	2	2	12	06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5	2	2	13		**Belanja Pakaian Kerja**
5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5	2	2	13	02	Belanja Kelengkapan Kerja
5	2	2	14		**Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertenta**
5	2	2	14	01	Belanja Pakaian KORPRI
5	2	2	14	02	Belanja Pakaian adat daerah
5	2	2	14	03	Belanja Pakaian batik tradisional
5	2	2	14	04	Belanja Pakaian olahraga
5	2	2	15		**Belanja Perjalanan Dinas**
5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	2	15	03	Belanja Perjalanan Dinas Tetap Dalam Daerah
5	2	2	15	04	Belanja Transportasi
5	2	2	16		**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**
5	2	2	16	01	Belanja Beasiswa tugas belajar D3
5	2	2	16	02	Belanja Beasiswa tugas belajar S1
5	2	2	16	03	Belanja Beasiswa tugas belajar S2
5	2	2	16	04	Belanja Beasiswa tugas belajar S3
5	2	2	16	05	Dst .....
5	2	2	17		**Belanja Knrana,Pelatihan,Sosiallsasi dan Bimbingan Teknis PNS**
5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
5	2	2	17	02	Belanja Sosialisasi
5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis
5	2	2	18		**Belanja Perjalanan Pindah Tugas**
5	2	2	18	01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
5	2	2	18	02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
5	2	2	18	03	Dst .....
5	2	2	19		**Belanja Pemulangan Pegawai**
5	2	2	19	01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
5	2	2	19	02	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
5	2	2	19	03	Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam melaksanakan tugas
5	2	2	19	04	Bst .....
5	2	2	20		**Belanja Pemeliharaen**
5	2	2	20	01	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Irigasi
5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan jaringan dan istalasi
5	2	2	20	06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	2	2	20	07	Belanja Pemeliharaan Drainase
5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Taman
5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Situs Purbakala
5	2	2	21		**Belanja Jasa Konsultasi**
5	2	2	21	01	Belanja jasa konsultasi penelitian
5	2	2	21	02	Belanja jasa konsultan pereneanaan
5	2	2	21	03	Belanja Jasa konsultasi Pengawasan
5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis
5	2	2	21	05	Belanja Jasa Konsultasi
5	2	2	22		**Belanja Barang Dana BOS**
5	2	2	22	01	Belanja Barang Dana BOS
5	2	2	23		**Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**
5	2	2	23	01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
5	2	2	23	02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
5	2	2	23	03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
5	2	2	24		**Belanja Barang Yang akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**
5	2	2	24	01	Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat
5	2	2	24	02	Belanja barang yang akan dijual kepada Pihak Ketiga
5	2	2	25		**Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit**
5	2	2	25	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

Dar Bag Hukum — Paraf Koordinasi

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	2	26		**Belanja Rnmah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
5	2	2	26	01	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5	2	2	26	02	Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5	2	2	26	03	Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5	2	2	26	04	Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5	**2**	**2**	**27**		**Belanja Kompensasi**
5	2	2	27	01	Belanja Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum
5	**2**	**2**	**28**		**Belanja Jasa Profesi**
5	2	2	28	01	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur /Narasumber
5	**2**	**2**	**29**		**Belanja Sewa Tanah**
5	2	2	29	01	Belanja Sewa Tanah
5	**2**	**3**			**Belanja Modal**
5	**2**	**3**	01		**Belanja Modal Pengadaan Tanah**
5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah kantor
5	2	3	01	02	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan rumah sakit
5	2	3	01	03	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan pukesmas
5	2	3	01	04	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan poliklinik
5	2	3	01	05	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan taman kanak - kanak
5	2	3	01	06	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5	2	3	01	07	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan umum dan kejuruan
5	2	3	01	08	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5	2	3	01	09	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5	2	3	01	10	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5	2	3	01	11	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana sosial panti asuhan
5	2	3	01	12	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana sosial panti jompo
5	2	3	01	13	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum terminal
5	2	3	01	14	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum dermaga
5	2	3	01	15	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5	2	3	01	16	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum rumah potong hewan
5	2	3	01	17	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5	2	3	01	18	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum pasar
5	2	3	01	19	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5	2	3	01	20	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum taman
5	2	3	01	21	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5	2	3	01	22	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum ibadah
5	2	3	01	23	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum stadion olah raga
5	2	3	01	24	Belanja Modal Pengadaan Tanah perumahan
5	2	3	01	25	Belanja Modal Pengadaan Tanah pertanian
5	2	3	01	26	Belanja Modal Pengadaan Tanah perkebunan
5	2	3	01	27	Belanja Modal Pengadaan Tanah perikanan
5	2	3	01	28	Belanja Modal Pengadaan Tanah peternakan
5	2	3	01	29	Belanja Modal Pengadaan Tanah perkampungan
5	2	3	01	30	Belanja Modal Pengadaan Tanah pergudangan / tempat penimbunan material bahan baku
5	2	3	01	31	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk penanggulangan banjir
5	2	3	01	32	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Irigasi
5	2	3	01	33	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Jalan
5	2	3	01	34	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Situs Purbakala
5	2	3	01	35	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk tugu batas kota
5	2	3	01	36	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Air Bersih

Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait: 1. 2. 3.
Kabag Hukum	

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	3	01	37	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Kawasan Wisata
5	2	3	01	38	Pengadaan Tanah Untuk Kompensasi Lahan
5	2	3	02		**Belanja Modal Pengadaan Alat Berat**
5	2	3	02	01	Belanja Modal Pengadaan traktor
5	2	3	02	02	Belanja Modal Pengadaan buldozer
5	2	3	02	03	Belanja Modal Pengadaan stomm wals
5	2	3	02	04	Belanja Modal Pengadaan esvkavator
5	2	3	02	05	Belanja Modal Pengadaan dump truk
5	2	3	02	06	Belanja Modal Pengadaan crane
5	2	3	02	07	Belanja Modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
5	2	3	02	08	Belanja Modal Pengadaan mesin pengolah semen
5	2	3	02	09	Belanja Modal Pengadaan mesin pengolah air bersih
5	2	3	02	10	Belanja Modal alat -alat bantu
5	2	3	02	11	Belanja Modal Pengadaan Kontainer
5	2	3	02	12	Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader
5	2	3	02	13	Belanja Modal Escalator
5	2	3	03		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor**
5	2	3	03	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan
5	2	3	03	02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep
5	2	3	03	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor station wagon
5	2	3	03	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor bus
5	2	3	03	05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor mikro bus
5	2	3	03	06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor truek
5	2	3	03	07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor tangki (air,minyak,tinja)
5	2	3	03	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor boks
5	2	3	03	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor pick up
5	2	3	03	10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor ambulance
5	2	3	03	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor pemadam kebakaran
5	2	3	03	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
5	2	3	03	13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor lift / elevator
5	2	3	03	14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Barat Bermotor tangga bejalan
5	2	3	03	15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga
5	2	3	04		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Daret Tidak Bermotor**
5	2	3	04	01	Belanja Modal Pengadaan gerobak
5	2	3	04	02	Belanja Modal Pengadaan Pedati/Delman/Dokar/Bendi/Cidomo/Andong
5	2	3	04	03	Belanja Modal Pengadaan becak
5	2	3	04	04	Belanja Modal Pengadaan sepeda
5	2	3	04	05	Belanja Modal Pengadaan karavan
5	2	3	04	06	Belanja Modal Pengadaan Trolly
5	2	3	05		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Atas Air Bermotor**
5	2	3	05	01	Belanja Modal Pengadaan kapal motor
5	2	3	05	02	Belanja Modal Pengadaan kapal feri
5	2	3	05	03	Belanja Modal Pengadaan speed boat
5	2	3	05	04	Belanja Modal Pengadaan motor boad/motor tempel
5	2	3	05	05	Belanja Modal Pengadaan hydro foil
5	2	3	05	06	Belanja Modal Pengadaan jet foil
5	2	3	05	07	Belanja Modal Pengadaan kapal tug boat
5	2	3	05	08	Belanja Modal Pengadaan kapal tanker
5	2	3	05	09	Belanja Modal Pengadaan kapal kargo
5	2	3	05	10	Belanja Modal Pengadaan mesin tempel

Paraf Koordinasi

Sekda	SKPDi Bagian Pemrakarsa
Asisten	SKPDi Bagian Terkait 1. ____ 2. ____ 3. ____
Kabag Hukum	

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	3	06		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Atas Air Tidak Bermotor**
5	2	3	06	01	Belanja Modal Pengadaan perahu layar
5	2	3	06	02	Belanja Modal Pengadaan perahu sampan
5	2	3	06	03	Belanja Modal Pengadaan perahu tongkang
5	2	3	06	04	Belanja Modal Pengadaan perahu karet
5	2	3	06	05	Belanja Modal Pengadaan perahu rakit
5	2	3	06	06	Belanja Modal Pengadaan perahu skoci
5	2	3	06	07	Dst .....
5	2	3	07		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara**
5	2	3	07	01	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Kargo
5	2	3	07	02	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Penumpang
5	2	3	07	03	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Helikopter
5	2	3	07	04	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Pemadam Kebakaran
5	2	3	07	05	Belanja Modal Pengadaan Pesawat capung
5	2	3	07	06	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Ampibi
5	2	3	07	07	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Layang
5	2	3	07	08	Dst .....
5	2	3	08		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel**
5	2	3	08	01	Belanja Modal Pengadaan mesin las
5	2	3	08	02	Belanja Modal Pengadaan mesin bubut
5	2	3	08	03	Belanja Modal Pengadaan mesin dongkrak
5	2	3	08	04	Belanja Modal Pengadaan mesin kompresor
5	2	3	08	05	Belanja Modal Pengadaan Genset
5	2	3	08	06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
5	2	3	08	07	Belanja Modal Pompa Air
5	2	3	08	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan
5	2	3	09		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan**
5	2	3	09	01	Belanja Modal Pengadaan penggilingan hasil pertanian
5	2	3	09	02	Belanja Modal Pengadaan alat pengering gabah
5	2	3	09	03	Belanja Modal Pengadaan mesin bajak
5	2	3	09	04	Belanja Modal Pengadaan alat penetas
5	2	3	09	05	Belanja Modal Alat pemantau kwalitas air
5	2	3	09	06	Belanja Modal Alat pengolah / penecah sampah
5	2	3	09	07	Belanja modal alat pemotong rumput
5	2	3	09	08	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer
5	2	3	09	09	Belanja modal peralatan dan mesin pertanian
5	2	3	09	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan
5	2	3	09	11	Belanja modal pengadaan mesin diesel
5	2	3	09	12	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan
5	2	3	09	13	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan
5	2	3	09	14	Belanja Modal Pengadaan Karamba
5	2	3	09	15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
5	2	3	09	16	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian
5	2	3	10		**Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor**
5	2	3	10	01	Belanja Modal Pengadaan mesin tik
5	2	3	10	02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
5	2	3	10	03	Belanja Modal Pengadaan mesin stensil
5	2	3	10	04	Belanja Modal Pengadaan mesin fotocopy
5	2	3	10	05	Belanja Modal Pengadaan mesin cetak
5	2	3	10	06	Belanja Modal Pengadaan mesin jilid
5	2	3	10	07	Belanja Modal Pengadaan mesin potong kertas
5	2	3	10	08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5	2	3	10	09	Belanja Modal Pengadaan papan tulis elektrik
5	2	3	10	10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik
5	2	3	10	11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran

Setda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	3	10	12	Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5	2	3	10	13	Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik
5	2	3	10	14	Belanja Modal Papan Data
5	2	3	10	15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating
5	2	3	10	16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel
5	2	3	10	17	Belanja Modal Pengadaan Terpal
5	2	3	10	18	Belanja Modal Pengadaan Card Reader
5	2	**3**	11		**Belanja Modal** Pengadaan **Perlengkapan Kantor**
5	2	3	11	01	Belanja Modal Pengadaan meja gambar
5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan almari
5	2	3	11	03	Belanja Modal Pengadaan Brankas
5	2	3	11	04	Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet
5	2	3	11	05	Belanja Modal pengadaan white board
5	2	3	11	06	Belanja Modal Pengadaan penunjuk waktu
5	2	3	11	07	Belanja Modal Pengadaan AC
5	2	3	11	08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5	2	3	11	09	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman
5	2	3	11	10	Belanja Modal Pengadaan Layar
5	2	3	11	11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5	2	3	11	12	Belanja Modal Pengadaan Tenda/Terop
5	2	3	11	13	Belanja Modal Pengadaan Lambang/Logo
5	2	3	11	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Tempat Sampah
5	2	3	11	15	Belanja Modal Pengadaan Tangga
5	2	3	11	16	Belanja Modal Pengadaan Tangga
5	2	3	11	17	Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca/Etalase
5	2	3	11	18	Belanja Modal Pengadaan Tiang Antrian
5	2	3	11	19	Belanja Modal Pengadaan Penyangga LCD
5	2	**3**	12		**Belanja Modal** Pengadaan **Komputer**
5	2	3	12	01	Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / sever
5	2	3	12	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
5	2	3	12	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan printer
5	2	3	12	05	Belanja Modal Pengadaan seaner
5	2	3	12	06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
5	2	3	12	07	Belanja Modal Pengadaan CPU
5	2	3	12	08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
5	2	3	12	09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer (flash disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker)
5	2	3	12	10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5	2	3	13		**Belanja Modal Pengadaan Meubelair**
5	2	3	13	01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
5	2	3	13	02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat
5	2	3	13	03	Belanja Modal Pengadaan meja makan
5	2	3	13	04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
5	2	3	13	05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
5	2	3	13	06	Belanja Modal Pengadaan kursi makan
5	2	3	13	07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur
5	2	3	13	08	Belanja Modal Pengadaan sofa
5	2	3	13	09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
5	2	3	13	10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa
5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu
5	2	3	13	12	Belanja Modal Pengadaan Mimbar Podium
5	2	3	13	13	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu
5	2	3	13	14	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis/White board
5	2	3	14		**Belanja Modal Pengadaan** Peralatan **Dapur**

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	3	14	01	Belanja Modal Pengadaan tabung gas
5	2	3	14	02	Belanja Modal Pengadaan kompor gas
5	2	3	14	03	Belanja Modal Pengadaan lemari makan
5	2	3	14	04	Belanja Modal Pengadaan dispenser
5	2	3	14	05	Belanja Modal Pengadaan kulkas
5	2	3	14	06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
5	2	3	14	07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / eangkir / sendok / garpu / pisau
5	2	3	14	08	Belanja Modal Pengadaan Majig Jar
5	2	3	14	09	Belanja Modal Mesin Cuei
5	2	3	14	10	Belanja Modal pengadaan alat rumah tangga
5	2	3	14	11	Belanja Modal Pengadaan Troly Food
5	2	3	14	12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering
5	2	3	14	13	Belanja Modal Pengadaan Watyer Furifer
5	2	3	14	14	Belanja Modal Penampung Air
5	2	3	14	15	Belanja Modal Water Heater
5	2	3	14	16	Belanja Modal Pengadaan Kompor Biogas
5	2	3	14	18	Belanja Modal Pengadaan Prasmanan Set
5	**2**	**3**	**15**		**Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga**
5	2	3	15	01	Belanja Modal Pengadaan lampu hias
5	2	3	15	02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
5	2	3	15	03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
5	2	3	15	04	Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
5	2	3	15	05	.....
5	2	3	15	06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu
5	2	3	15	07	Belanja Modal Pengadaan Karpet
5	2	3	15	08	Belanja Modal Pengadaan Jemuran
5	**2**	**3**	16		**Belanja Modal** Pengadaan **Alat-alat Studio**
5	2	3	16	01	Belanja Modal Pengadaan kamera
5	2	3	16	02	Belanja Modal Pengadaan handycam
5	2	3	16	03	Belanja Modal Pengadaan proyektor
5	2	3	16	04	Belanja Modal Pengadaan Alat kelengkapan studio
5	2	3	16	05	Belanja Modal Pengadaan sound system
5	2	3	16	06	Belanja modal pengadaan Wireles set
5	2	3	16	07	Belanja Modal VCD/DVD Player
5	2	3	16	08	Belanja Modal Pengadaan CCTV
5	2	3	16	09	Belanja Modal Pengadaan Tape Mobil
5	**2**	**3**	17		**Belanja Modal** Pengadaan **Alat-alat Komunikasi**
5	2	3	17	01	Belanja Modal Pengadaan telepon
5	2	3	17	02	Belanja Modal Pengadaan faximile
5	2	3	17	03	Belanja Modal Pengadaan radio SSB
5	2	3	17	04	Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)
5	2	3	17	05	Belanja Modal Pengadaan radio VHF
5	2	3	17	06	Belanja Modal Pengadaan radio UHF
5	2	3	17	07	Belanja Modal Pengadaan alat Sandi
5	2	3	17	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5	2	3	17	09	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi
5	**2**	**3**	18		**Belanja Modal** Pengadaan **Alat-alat nknr**
5	2	3	18	01	Belanja Modal Pengadaan timbangan
5	2	3	18	02	Belanja Modal Pengadaan teodolite
5	2	3	18	03	Belanja Modal Pengadaan alat uji emisi
5	2	3	18	04	Belanja Modal Pengadaan alat GPS
5	2	3	18	05	Belanja Modal Pengadaan kompas / peralatan navigasi
5	2	3	18	06	Belanja Modal Pengadaan bejana ukur
5	2	3	18	07	Belanja Modal Pengadaan barometer

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.
3.

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	3	18	08	Belanja Modal Pengadaan seismograp
5	2	3	18	09	Belanja Modal Pengadaan Ultrasonograp
5	2	3	18	10	Belanja Modal Fisk Finder
5	2	3	18	12	Belanja Modal Pengadaan Meteran
5	2	3	18	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Centrifuge Extraetor Test
5	2	3	18	14	Belanja Modal Pengadaan Soumd Level Meter
5	2	3	18	15	Belanja Modal Pengadaan Disto Meter
5	2	3	18	16	Belanja Modal Pengadaan Disto MeterAltimeter
5	2	3	18	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Keeepatan
5	2	**3**	19		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokterran**
5	2	3	19	01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran Umum
5	2	3	19	02	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran gigi
5	2	3	19	03	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran THT
5	2	3	19	04	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran mata
5	2	3	19	05	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran bedah
5	2	3	19	06	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran anak
5	2	3	19	07	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran kebidanan dan penyakit kandungan
5	2	3	19	08	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran kulit dan kelamin
5	2	3	19	09	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran kardiologi
5	2	3	19	10	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran neurologi
5	2	3	19	11	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran orthopedi
5	2	3	19	12	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedoteran hewan
5	2	3	19	13	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Parmasi
5	2	3	19	14	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Penyakit dalam / internis
5	2	3	19	15	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda
5	2	**3**	20		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboraturinm**
5	2	3	20	01	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium biologi
5	2	3	20	02	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium fisika / geologi / geodesi
5	2	3	20	03	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium kimia
5	2	3	20	04	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium pertanian
5	2	3	20	05	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium peternakan
5	2	3	20	06	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium pekerbunan
5	2	3	20	07	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium perikanan
5	2	3	20	08	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium bahasa
5	2	3	20	09	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah
5	2	3	20	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Laberaterium Lalnnya
5	2	**3**	21		**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan**
5	2	3	21	01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
5	2	3	21	02	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan fly over
5	2	3	21	03	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan under pas
5	2	3	21	04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan
5	2	**3**	22		**Belanja Modal Pengadaan Konstrukal Jembatan**
5	2	3	22	01	Belanja Mndal Pengadaan Kontruksi Jembatan gantung
5	2	3	22	02	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan pontun
5	2	3	22	03	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan jalan orang
5	2	3	22	04	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air
5	2	**3**	**23**		**Belanja Modal Pengadaan Konstrnksi Jaringan Air**
5	2	3	23	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan
5	2	3	23	02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi waduk
5	2	3	23	03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal permukaan
5	2	3	23	04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal bawah tanah
5	2	3	23	05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
5	2	3	23	06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih/air minum

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

SKPD/ Bagian Terkait:
1.
2.
3.

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	3	23	07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservour
5	2	3	23	08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pintu air
5	2	3	23	09	Belanja Modal Kontruksi Drainase
5	2	3	23	10	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
5	2	3	23	11	Belanja Modal Konstrruksi Sumur Bor/gas
5	2	3	23	12	Belanja Modal Konservasi
5	2	3	23	13	Belanja Modal Pembuatan Jalur Labuh Perahu
5	2	3	24		**Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hntan Kota**
5	2	3	24	01	Belanja Modal Pengadaan Lampu hias jalan
5	2	3	24	02	Belanja Modal Pengadaan Lampu hias taman
5	2	3	24	03	Belanja Modal Pengadaan Lampu penerangan hutan kota
5	2	3	24	04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
5	2	3	25		**Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik** dan Telepon
5	2	3	25	01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
5	2	3	25	02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon
5	2	3	25	03	Belanja modal pengadaan instalasi Air
5	2	3	26		**Belanja Modal pengadaan Konstruksi**/Pembelian Bangunan
5	2	3	26	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor
5	2	3	26	02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah jabatan
5	2	3	26	03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah dinas
5	2	3	26	04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
5	2	3	26	05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan bersejarah
5	2	3	26	06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan monumen
5	2	3	26	07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tugu batas Kabupaten
5	2	3	26	08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Rambu - rambu
5	2	3	26	09	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata
5	2	3	26	10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
5	2	3	26	11	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Fasilitas Sanitasi
5	2	3	26	12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksii/ pembelian MCK
5	2	3	26	13	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi /pemnelian Kios Pedagang
5	2	3	26	14	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Terminal
5	2	3	26	15	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pasar
5	2	3	26	16	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Stadion Olah raga
5	2	3	26	17	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/pembelian tempat Pengolah Sampah
5	2	3	26	18	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Menara
5	2	3	26	19	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Tanaman
5	2	3	26	20	Belanja Modal Pengadaan Landasan Pacu Bandar Udara
5	2	3	26	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Unit Pembenihan Rakyat
5	2	3	26	22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penerangan Jalan dan Taman
5	2	3	26	23	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Kolam
5	2	3	26	24	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan
5	2	3	26	25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
5	2	3	26	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Gedung Sarana Kesehatan
5	2	3	26	27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir
5	2	3	26	28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Gapura
5	2	3	27		**Belanja Modal Pengadaan Bnka/Kepustakaan**
5	2	3	27	01	Belanja Modal pengadaan Buku matematika
5	2	3	27	02	Belanja Modal pengadaan Buku fisika
5	2	3	27	03	Belanja Modal pengadaan Buku kimia
5	2	3	27	04	Belanja Modal pengadaan Buku biologi
5	2	3	27	05	Belanja Modal pengadaan Buku biografi
5	2	3	27	06	Belanja Modal pengadaan Buku geografi
5	2	3	27	07	Belanja Modal pengadaan Buku astronomi
5	2	3	27	08	Belanja Modal pengadaan Buku arkeologi
5	2	3	27	09	Belanja Modal pengadaan Buku bahasa dan sastra

Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait: 1. 2. 3.	
Kabag Hukum			

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	3	27	10	Belanja Modal pengadaan Buku keagamaan
5	2	3	27	11	Belanja Modal pengadaan Buku sejarah
5	2	3	27	12	Belanja Modal pengadaan Buku seni dan budaya
5	2	3	27	13	Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan
5	2	3	27	14	Belanja Modal pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
5	2	3	27	15	Belanja Modal pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan
5	2	3	27	16	Belanja Modal pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan teknologi
5	2	3	27	17	Belanja Modal pengadaan Buku Ensiklopedia
5	2	3	27	18	Belanja Modal pengadaan Buku Kamus Bahasa
5	2	3	27	19	Belanja Modal pengadaan Buku ekonomi dan keuangan
5	2	3	27	20	Belanja Modal pengadaan Buku Industri dan Perdagangan
5	2	3	27	21	Belanja Modal pengadaan Buku peraturan perundang-undangan
5	2	3	27	22	Belanja Modal pengadaan Buku Naskah
5	2	3	27	23	Belanja Modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compack Disk)
5	2	3	27	24	Belanja Modal pengadaan mikrofilm
5	2	3	27	25	Belanja Modal Pengadaan Peta/atlas/globe
5	2	3	27	26	Belanja Modal Buku Pelajaran
5	2	3	27	27	Belanja Modal Peta Tematik
5	2	3	28		**Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan**
5	2	3	28	01	Belanja Modal Pengadaan lukisan / foto
5	2	3	28	02	Belanja Modal Pengadaan patung
5	2	3	28	03	Belanja Modal Pengadaan ukiran
5	2	3	28	04	Belanja Modal Pengadaan pahatan
5	2	3	28	05	Belanja Modal Pengadaan batu alam
5	2	3	28	06	Belanja Modal Pengadaan market / miniatur/diorama
5	2	3	28	07	Belanja Modal Pengadaan Gamelan
5	2	3	28	08	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
5	2	3	29		Belanja **Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman**
5	2	3	29	01	Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5	2	3	29	02	Belanja Modal Pengadaan ternak
5	2	3	29	03	Belanja Modal Pengadaan tanaman
5	2	3	29	04	Dst .....
5	2	3	30		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan /Keamanan**
5	2	3	30	01	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api
5	2	3	30	02	Belanja Modal Pengadaan Radar
5	2	3	30	03	Belanja Modal Pengadaan mobil water canon
5	2	3	30	04	Belanja Modal Pengadaan borgol
5	2	3	30	05	Belanja Modal Pengadaan sangkur / bayonet
5	2	3	30	06	Belanja Modal Pengadaan perisai / tameng
5	2	3	30	07	Belanja Modal Pengadaan detektor logam
5	2	3	30	08	Belanja Modal Pengadaan rompi anti peluru
5	2	3	30	09	Belanja Modal Pengadaan pentungan
5	2	3	30	10	Belanja Modal Pengadaan helm
5	2	3	30	11	Belanja Modal Pengadaan alarm / sirine
5	2	3	30	12	Belanja Modal Pengadaan sentolop / senter
5	2	3	30	13	Belanja Modal Pengadaan Baju Pelampung/Pelampung
5	2	3	30	14	Belanja Modal Peralatan Selam
5	2	3	30	15	Belanja Modal Pengadaan Teropong
5	2	3	30	16	Belanja Modal Pengadaan Papan Selancar
5	2	3	30	17	Belanja Modal Kelengkapan Evakuasi
5	2	3	31		**Belanja Modal Dana BOS**
5	2	3	31	01	Belanja Modal Dana BOS
5	2	3	32		**Belanja Modal BLUD Rumah Sakit**
5	2	3	32	01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit

Sekda	SKPD/ Bagian Pelaksana
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait: 1. 2. 3.
Kabag Hukum	

Kode Rekening					Nama Rekekning
5	2	3	33		**Belanja Modal Pengadaan Pewrlengkapan / Peralatan Rumah Tangga**
5	2	3	33	01	Belanja Modal Pengadaan Pewrlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
5	2	3	34		**Belanja Modal Pengadaan Pewrlengkapan / Peralatan Praktek**
5	2	3	34	01	Belanja Modal Pengadaan Pewrlengkapan / Peralatan Praktek
5	2	3	35		**Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis**
5	2	3	35	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis
5	2	3	36		**Belanja Modal Pengadaan Insalasi Central Gas Medis**
5	2	3	36	01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Lampiran V : **PERATURAN BUPATI PACITAN**
Nomor : 19 Tahun 2016
Tanggal : 30 - 5 - 2016

KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

					PEMBIAYAAN DAERAH
6	1				**Penerimaan Pembiayaan Daerah**
6	1	1			**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya**
6	1	1	01		**Pelampunen penerimean PAD**
6	1	1	01	01	Pajak Daerah
6	1	1	01	02	Retribusi Daerah
6	1	1	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Baerah yang Dipisahkan
6	1	1	01	04	Lain-Lain PAD yang sah
6	1	1	02		**Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan**
6	1	1	02	01	Bagi Hasil Pajak
6	1	1	02	02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6	1	1	02	03	Dana Alokasi Umum
6	1	1	02	04	Dana Alokasi Khusus
6	1	1	03		**Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**
6	1	1	03	01	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6	1	1	03	02	Penerimaan Lain-lain
6	1	1	03	03	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemeriniah Daerah Lainnya
6	1	1	03	04	Dana Penyesuaian dun Otonomi Khusus
6	1	1	03	05	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	1	04		**Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnyu**
6	1	1	04	01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
6	1	1	04	02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6	1	1	04	03	Belanja Barang dan Jasa
6	1	1	04	04	Belanja Modal
6	1	1	04	05	Belanja Bunga
6	1	1	04	06	Belanja Subsidi
6	1	1	04	07	Belanja Hibah
6	1	1	04	08	Belanja Bantuan Sosial
6	1	1	04	09	Belanja Belanja Bagi Hasil
6	1	1	04	10	Belanja Bantuan Keuangan
6	1	1	04	11	Belanja Belanja Tidak Terduga
6	1	1	04	12	Dst .....
6	1	1	05		**Kewajiban kepada pihak ketiga sampal dengan akhir tahnn belnm terselesaikan**
6	1	1	05	01	Uang Jaminan
6	1	1	05	02	Potongan Taspen
6	1	1	05	03	Potongan Beras
6	1	1	05	04	Askes
6	1	1	05	05	Dst.....
6	1	1	06		**Kegiatan lanjutan**
6	1	1	06	01	Kegiatan lanjutan
6	1	1	06	02	Dst.....
6	1	1	07		**Pelampanan Penerimaan Piutang**
6	1	1	07	01	Pelampauan Pencairan Dana Cadangan
6	1	1	07	02	Pelampauan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait: 1. _____ 2. _____	
Kabag Hukum			

6	1	1	07	03	Pelampauan Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	1	07	04	Pelampauan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6	1	1	07	05	Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah
6	1	1	07	06	Pelampauan Penerimaan Pengembalian Modal Investasi
6	1	1	07	07	Dst .....
6	1	1	08		Penghematan Pengeluaran Pembiayaan
6	1	1	08	01	Penghematan Pembentukan Dana Cadangan
6	1	1	08	02	Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6	1	1	08	03	Penghematan Pembiayaan Pokok Utang
6	1	1	08	04	Penghematan Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	1	08	05	Dst .....
6	1	2			Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	02	Dst.....
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	3	01		Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
6	1	3	01	01	BUMD.....
6	1	3	01	02	Dst.....
6	1	3	02		Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
6	1	3	02	01	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yg dikerjasamakan dgn pihak ketiga
6	1	3	02	02	Dst.....
6	1	4			Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
6	1	4	01		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6	1	4	01	01	Penerusan pinjaman.....
6	1	4	01	02	Dst.....
6	1	4	02		Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
6	1	4	02	01	Pemerintah daerah .....
6	1	4	02	02	Dst.....
6	1	4	03		Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
6	1	4	03	01	Bank .....
6	1	4	03	02	Dst.....
6	1	4	04		Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6	1	4	04	01	Lembaga keuangan bukan bank .....
6	1	4	04	02	Dst.....
6	1	4	05		Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
6	1	4	05	01	Obligasi atas nama..
6	1	4	05	02	Obligasi Nomor
6	1	4	05	03	Dst.....
6	1	5			Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6	1	5	01		Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Swasta
6	1	5	01	02	Dst.....
6	1	6			Penerimaan piutang daerah
6	1	6	01		Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6	1	6	01	01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6	1	6	01	02	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6	1	6	01	03	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
6	1	6	01	04	Dst.....

Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

6	1	6	02		**Penerimaan piutang daerah dari pemerintah**
6	1	6	02	01	Penerimaan piutang daerah dari Pemerintah
6	1	6	02	02	Dst.....
6	1	6	03		**Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain**
6	1	6	03	01	Pemerintah daerah .....
6	1	6	03	02	Dst.....
6	1	6	04		**Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank**
6	1	6	04	01	Bank.....
6	1	6	04	02	Dst.....
6	1	6	05		**Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank**
6	1	6	05	01	Lembaga keuangan bukan bank .....
6	1	6	05	02	Dst.....
6	1	6	06		**Penerimaan piutang Revolping**
6	1	6	06	01	Penerimaan Piutang Revolping
6	1	6	05	02	Penerimaan Piutang
6	1	7			**Penerimaan dari Selisih Bayar**
6	1	7	01		**Penerimaan dari Selisih Bayar Kasda**
6	1	7	01	01	**Penerimaan dari Selisih Bayar Kasda**
6	1	7	06		**Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir**
6	1	7	05	01	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
6	1	7	06	02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
6	2				**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**
6	2	1			**Pembentukan Dana Cadangan**
6	2	1	01		**Pembentukan Dana Cadangan**
6	2	1	01	01	**Pembentukan Dana Cadangan**
6	2	1	01	02	Dst.....
6	2	2			**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**
6	2	2	01		**Badan usaha milik pemerintah (BUMN)**
6	2	2	01	01	BUMN .....
6	2	2	01	02	Dst.....
6	2	2	02		**Badan usaha milik daerah (BUMD)**
6	2	2	02	01	**Bank Jatim**
6	2	2	02	02	Bank Perkreditan Rakyat
6	2	2	02	03	Perusahaan Daerah Air Minum
6	2	2	02	04	Perusda Batu Alam
6	2	2	02	05	Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)
6	2	2	02	06	Perusahaan Daerah Aneka Usaha
6	2	2	03		**Badan usaha milik swasta**
6	2	2	03	01	Dana Bergulir Koperasi
6	2	2	03	02	Dst.....
6	2	2	04		**Dana Bergulir**
6	2	2	04	01	Dana Bergulir Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
6	2	2	04	02	Dana Bergulir Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
6	2	3			**Pembayaran Pokok Utang**
6	2	3	01		**Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah**
6	2	3	01	01	Penerusan pinjaman (SLA)
6	2	3	01	02	Rekening Dana Investasi (RDI)

Par	Kabag Ekbang		Paraf Koordinasi
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait: 1. 2. 3.	
Kabag Hukum			

6	2	3	02		**Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain**
6	2	3	02	01	Pemerintah daerah.....
6	2	3	02	02	Dst.....
6	2	3	03		**Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank**
6	2	3	03	01	Bank BRI
6	2	3	03	02	Dst.....
6	2	3	04		
					Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
6	2	3	04	01	Lembaga keuangan bukan bank
6	2	3	04	02	Dst.....
6	2	3	05		**Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah**
6	2	3	05	01	**Penerusan pinjaman.....**
6	2	3	05	02	Dst.....
6	2	3	06		**Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain**
6	2	3	06	01	Pemerintah daerah ....
6	2	3	06	02	Dst.....
6	2	3	07		**Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank**
6	2	3	07	01	**Bank.....**
6	2	3	07	02	Dst.....
6	2	3	08		**bank**
6	2	3	08	01	Lembaga Keuangan bukan bank.....
6	2	3	08	02	Dst.....
6	2	3	09		**Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo**
6	2	3	09	01	**Obligasi atas nama.....**
6	2	3	09	02	**Obligasi nomor.....**
6	2	3	09	03	**Dst.....**
6	2	3	10		**Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo**
6	2	3	10	01	**Obligasi atas nama.....**
6	2	3	10	02	**Obligasi nomor.....**
6	2	3	10	03	**Dst.....**
6	2	4			**Pemberian Pinjaman Daerah**
6	2	4	01		**Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah**
6	2	4	01	01	**Pemerintah**
6	2	4	02		**Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain**
6	2	4	02	01	**Pemerintah daerah lain**
6	2	4	02	02	**Dst.....**
6	2	4	03		**Pemberian Pinjaman Revolping**
6	2	4	03	01	**Pemberian Pinjaman Revolping**
6	2	4	03	02	**Pemberian Pinjaman**
6	2	5			**Pengeluaran dari selisih bayar**
6	2	5	01		Pengeluaran dari selisih bayar kas daerah
6	2	5	01	01	Pengeluaran dari selisih bayar kas daerah
6	2	5	01	02	Pengeluaran xxx
6	3				**Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan**
8					**Rekening Koran Antar Unit**
8	1				**RK BUD**
8	1	1			RK-BUD terhadap Bendahara Penerimaan SKPD
8	1	2			RK-BUD terhadap Bendahara Pengeluaran SKPD

Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD/ Bagian Terkait:
1. _____
2. _____
3. _____

8	1	3			RK BUD terhadap Pengurus Barang SKPD
8	2				**RK SKP**D
8	2	1			RK Bendahara Penerimaan SKPD terhadap BUD
8	2	2			RK Bendahara Pengeluaran SKPD terhadap BUD
8	2	3			RK Pengurus Barang SKPD terhadap BUD

BUPATI PACITAN

INDARTATO